

# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029**



**DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2025**

## **KATA PENGANTAR**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Teknokratik tentang Rencana Strategis periode 2025-2029.

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak merupakan salah satu Direktorat teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai fungsi di bidang Perbibitan dan Produksi Ternak. Pembangunan perbibitan dan produksi ternak sebagai bagian dari sub sektor peternakan dan kesehatan hewan akan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi terutama perubahan kebijakan dan teknologi, oleh karena itu penyusunan Rencana Strategis Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kegiatan strategis pada Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak dilaksanakan untuk mencapai sasaran program pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Jakarta,  
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak

Dr. Hary Suhada, S.Pt., M.Sc.  
NIP. 197410052001121001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Kondisi Umum .....	7
1.2. Capaian Kinerja Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak.....	7
1.3. Capaian Rencana Strategis Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak Tahun 2020-2024.....	3
1.3.1. Capaian Peningkatan Mutu Produk Peternakan untuk Komoditas Ekspor .....	5
1.3.2. Terpenuhinya Populasi Ternak Sesuai Kebutuhan .....	6
1.3.3. Terpenuhinya Bibit Ternak Sesuai Kebutuhan Produksi .....	11
1.3.4. Tersedianya Standar Benih Ternak dan Bibit Ternak Sesuai Kebutuhan .....	14
1.3.5. Meningkatnya Ketersediaan Benih dan Bibit Bermutu .....	14
1.3.6. Meningkatnya Produksi Susu untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Nasional.....	15
1.3.7. Meningkatnya Produksi Telur untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Nasional.....	16
1.3.8. Tersedianya Sarana Prasarana Perbibitan dan Produksi Ternak .....	18
1.4. Potensi dan Permasalahan .....	18
1.4.1. Potensi.....	19
1.4.2. Peluang .....	20
1.4.3. Permasalahan .....	22
1.4.4. Ancaman .....	23
1.5. Analisis SWOT kegiatan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.....	24
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN .....	26
DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK .....	26
4.1. Visi Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak .....	26
4.2. Misi Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.....	28
4.3. Tujuan .....	29
4.4. Manajemen Risiko Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan ..	31
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	34
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	34
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak	38
3.3. Kontribusi Dit. Bitpro Terhadap Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) dalam RPJMN .....	38
3.4. Kerangka Regulasi.....	39

3.5. Kerangka Kelembagaan .....	40
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	42
4.1. Target Kinerja .....	42
4.2. Kerangka Pendanaan.....	43
BAB V PENUTUP .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Populasi Ternak Sesuai Kebutuhan Produksi (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi).....	9
Gambar 2. Capaian Populasi Ternak Sesuai Kebutuhan Produksi (Ayam dan Itik) 11	
Gambar 3. Kerangka Strategis Ditjen PKH Tahun 2025-2029 .....	34

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Renstra 2020-2024 .....	3
Tabel 2. Target dan Realisasi Mutu Produk Peternakan untuk Komoditas Ekspor Tahun 2020-2024.....	5
Tabel 3. Realisasi Populasi Ternak Siap Potong 2020-2024.....	6
Tabel 4. Target dan Realisasi Ayam dan Itik Siap Potong Tahun 2020-2024 .....	9
Tabel 5. Target dan Realisasi Bibit Ternak Sesuai Kebutuhan produksi Tahun 2020-2024 .....	11
Tabel 6. Target dan Realisasi Rasio Standar Benih dan Bibit Ternak yang Dihasilkan pada Tahun 2020-2024.....	14
Tabel 7. Realisasi Rasio Benih dan Bibit yang Bersertifikat.....	14
Tabel 8. Realisasi produksi Susu Tahun 2020 – 2024.....	15
Tabel 9. Target dan Realisasi Jumlah Betina Laktasi Ternak Perah Sesuai Kebutuhan Produksi Susu Tahun 2021 - 2024 .....	15
Tabel 10. Target dan Realisasi Produksi Bibit Sapi Perah Tahun 2021 - 2024.....	16
Tabel 11. Realisasi Produksi Telur Tahun 2020-2024.....	16
Tabel 12. Realisasi Populasi Ayam Ras Petelur Sesuai Kebutuhan Produksi Telur Tahun 2020-2024 .....	17
Tabel 13. Realisasi Tingkat Kemanfaatan Saranan Prasarana Perbibitan dan Produksi Ternak Tahun 2020 – 2024 .....	18
Tabel 14. Identifikasi Risiko Sasaran Kegiatan .....	32
Tabel 15. Kontribusi Dit. Bitpro Terhadap Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) dalam RPJMN.....	39
Tabel 16. Matriks Kerangka Regulasi.....	40
Tabel 17. Target Sasaran Kinerja Dit. Bitpro .....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator Kinerja, Sasaran Kegiatan 2025-2029.....	45
Lampiran 2. Kegiatan dan Alokasi Anggaran Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Tahun 2025-2029.....	47
Lampiran 3. Manajemen Resiko.....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak yang selanjutnya disingkat menjadi Dit. Bitpro adalah unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dit. Bitpro dipimpin oleh seorang Direktur dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa Dit. Bitpro mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan dan budi daya ternak.

Dalam melaksanakan tugas Dit. Bitpro menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, perbibitan dan produksi ruminansia potong, ruminansia perah, unggas, aneka ternak, mutu ternak, sertifikasi, penerapan dan pengawasan standar, pengawasan produksi dan peredaran serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dit. Bitpro.

Berdasarkan peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas diwajibkan kepada setiap Unit Eselon II termasuk Dit. Bitpro untuk menyusun perencanaan teknokratik rencana strategis jangka menengah yang merupakan bagian dari rencana pembangunan strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH). Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Dit. Bitpro merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Ditjen. PKH Nomor 13718/KPTS/HK.160/F/12/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029.

### **1.2. Capaian Kinerja Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak**

Bibit ternak mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses produksi ternak, sehingga dalam perkembangannya selain kuantitas juga diperlukan kualitas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 yang mengatur tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak Nasional menyatakan bahwa perbibitan nasional mencakup penyediaan benih dan bibit ternak, peredaran benih dan bibit ternak, pengawasan benih dan bibit ternak, dan/ atau kelembagaan perbibitan. Penyediaan benih dan bibit ternak melalui pengadaan di dalam negeri dan/ atau pemasukan dari luar negeri. Pengadaan di dalam negeri difokuskan melalui produksi,

penetapan wilayah sumber bibit dan penetapan/ pelepasan rumpun atau galur ternak. Produksi benih dan/ atau bibit dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat, sedangkan produksi bibit ayam ras sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat/swasta. Produksi benih dan/ atau bibit pemerintah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) erbibitan sebanyak tiga unit produksi benih ternak dan tujuh unit produksi bibit ternak yang berlokasi di beberapa provinsi.

Produksi benih ternak di UPT Perbibitan selama periode 2021–2024 menunjukkan fluktuasi yang dinamis. Setelah mengalami sedikit penurunan dari 6.228.021 dosis pada tahun 2021 menjadi 6.045.675 dosis pada tahun 2022, produksi meningkat signifikan pada tahun 2023 hingga mencapai 7.805.857 dosis sebagai capaian tertinggi dalam periode tersebut. Pada tahun 2024, produksi kembali menurun menjadi 6.718.929 dosis, namun masih berada di atas capaian tahun 2021 dan 2022. Secara umum, kinerja produksi benih ternak tetap terjaga dengan kecenderungan meningkat dalam jangka menengah, meskipun dipengaruhi oleh variasi antar tahun.

Produksi bibit di UPT pada periode 2021–2023 menunjukkan peningkatan dari 1.166.807 ekor pada tahun 2021 menjadi 1.358.411 ekor pada tahun 2022, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 1.296.247 ekor. Sementara di tahun 2024 hanya sebanyak 587.474 ekor. Terjadinya penurunan produksi bibit di tahun 2024 tersebut dikarenakan adanya perubahan pendekatan cara perhitungan bibit. Produksi bibit tahun 2021 – 2023 dengan pendekatan kelahiran calon bibit ternak, namun pendekatan tersebut diubah menjadi ternak terseleksi sesuai SNI dan/atau bersertifikat di tahun 2024.

Penyediaan bibit oleh masyarakat dilakukan di wilayah sumber bibit yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian. Selama periode 2015 – 2019 telah ditetapkan sebanyak 23 wilayah sumber bibit ternak dengan komoditas kuda, sapi, kambing, domba dan itik. Setelah tahun 2019, tidak ada penetapan wilayah sumber bibit dikarenakan antara lain tidak adanya pengajuan penetapan wilayah sumber bibit dari daerah dan terjadinya wabah PMK pada tahun 2022.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya genetik hewan yang mempunyai potensi dikembangkan sebagai sumber bibit ternak. Pemerintah memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum, menjaga kelestarian dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan melalui kegiatan penetapan dan pelepasan rumpun atau galur ternak. Rumpun dan galur hewan yang telah ditetapkan dan dilepaskan selama

periode 2010- 2024 sebanyak 108 rumpun/galur. Pemasukan benih dan bibit dari luar negeri untuk tujuan antara lain meningkatkan mutu dan keragaman genetik dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan kepada peternak terhadap benih atau bibit yang beredar, maka diperlukan sertifikasi cara produksi dan produknya. Sertifikasi cara produksi dilakukan dengan penilaian kesesuaian pedoman pembibitan ternak yang baik dan pedoman budidaya ternak yang baik oleh Ditjen PKH atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi/kabupaten/ kota. Sedangkan, sertifikasi produk benih dan/atau bibit dilakukan penilaian oleh lembaga sertifikasi produk (LSPro) yang terakreditasi atau ditunjuk Menteri Pertanian.

### 1.3 Capaian Rencana Strategis Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak Tahun 2020-2024

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dit. Bitpro periode 2020-2024, penting untuk mengidentifikasi capaian yang telah diraih dalam lima tahun terakhir. Analisis capaian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan, program, serta kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan strategis yang lebih adaptif dan responsif dalam Renstra Dit. Bitpro periode 2025-2029, guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan kinerja sektor peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Analisis capaian Dit. Bitpro dilakukan terhadap capaian dari Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Renstra periode 2020-2024 (Tabel 1).

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Renstra 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya mutu produk peternakan untuk komoditas ekspor	Persentase Ekspor ternak yang diterima negara tujuan karena alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan (alasan penolakan : mutu ternak)	%	-	100	100	80,55	100
2	Terpenuhinya populasi ternak sesuai kebutuhan	Jumlah populasi ternak sapi siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	2.508.440	2.208.378	2.416.093	2.347.422	2.472.154
		Jumlah populasi ternak kerbau siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	128.375	103.224	106.623	105.836	104.515
		Jumlah populasi ternak kambing siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	4.776.933	4.304.487	4.541.150	4.206.965	4.171.957
		Jumlah populasi ternak domba siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	4.635.078	3.785.766	3.734.430	3.683.219	3.346.370

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah populasi ternak ayam siap potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	2.790.665.067	2.889.207.995	3.443.395.378	3.532.119.615	3.572.911.726
		Jumlah populasi ternak itik sesuai kebutuhan produksi	Ekor	37.610.440	32.216.353	34.144.155	33.030.234	33.048.273
		Jumlah populasi ternak babi potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	4.083.060	4.037.355	3.900.858	2.318.252	2.029.864
3	Terpenuhinya bibit ternak sesuai kebutuhan	Jumlah bibit sapi potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	-	1.339	1.955	1.954	338
		Jumlah bibit kerbau potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	-	70	66	75	85
		Jumlah bibit kambing potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	-	877	1.163	963	235
		Jumlah bibit ayam sesuai kebutuhan produksi	Ekor	-	433.174	588.812	539.683	31.543
		Jumlah bibit itik sesuai kebutuhan produksi	Ekor	-	730.922	765.376	753.056	170.679
		Jumlah bibit babi potong sesuai kebutuhan produksi	Ekor	-	0	707	0	100
4	Tersedianya standar benih dan bibit ternak sesuai kebutuhan	Rasio standar benih ternak yang dihasilkan terhadap total standar benih ternak yang direncanakan	%	100	90	100	100	100
		Rasio standar bibit ternak yang dihasilkan terhadap total standar bibit ternak yang direncanakan	%	100	90	100	100	100
5	Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit bermutu	Rasio benih dan bibit yang bersertifikat terhadap total benih dan bibit yang diajukan	%	92	80	89	100	100
6	Meningkatnya produksi susu untuk memenuhi kebutuhan protein nasional	Produksi Susu	Ton	947.685	946.388	824.273	787.374	808.325
		Jumlah betina laktasi ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu	Ekor	-	248.970	283.359	201.060	228.184
		Jumlah bibit sapi perah sesuai kebutuhan produksi	Ekor	-	425	332	543	556
7	Meningkatnya produksi telur untuk memenuhi kebutuhan protein nasional	Produksi Telur	Ton	5.044.395	5.155.998	6.335.453	6.886.986	6.581.605
		Jumlah betina produktif ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur	Ekor	2.108.401	268.365.351	351.733.762	353.030.589	301.274.645
8	Tersedianya sarana prasarana perbibitan dan produksi ternak	Tingkat kemanfaatan sarana perbibitan dan produksi ternak	%	100	100	98,97	93,04	98,00

Terjadi perubahan pada beberapa indikator kinerja sehingga realisasi pada tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021-

2024. Beberapa indikator yang mengalami perubahan sebelumnya antara lain:

- a. Rasio Ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan (alasan penolakan: mutu ternak);
- b. Jumlah betina produktif ternak sapi potong;
- c. Jumlah betina produktif ternak kerbau potong;
- d. Jumlah betina produktif ternak kambing potong;
- e. Jumlah betina produktif ternak domba potong;
- f. Jumlah betina produktif ternak ayam;
- g. Jumlah betina produktif ternak itik;
- h. Jumlah betina produktif ternak babi potong;
- i. Jumlah betina produktif ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu; dan
- j. Jumlah bibit sapi perah sesuai kebutuhan produksi.

### 1.3.1. Capaian Peningkatan Mutu Produk Peternakan untuk Komoditas Ekspor

Indikator ini menekankan pada persentase peningkatan mutu produk peternakan yang diterima oleh negara tujuan dari total produk yang diajukan. Komoditas produk peternakan yang di ekspor dari Indonesia ke negara tujuan berupa DOC, telur tertunas (*Hatching Egg*), ayam lokal, babi, kambing, domba, kelinci dan merpati.

Pada Renstra Dit. Bitpro tahun 2020-2024 telah ditetapkan target peningkatan mutu produk peternakan untuk komoditas ekspor dan terealisasi sebagaimana tabel 2.

Tabel 2. Target dan Realisasi Mutu Produk Peternakan untuk Komoditas Ekspor Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Target (%)	0	80	85	85	100
2	Realisasi (%)	0	100	100	80,55	100

Target persentase ekspor ternak yang diterima negara tujuan karena alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan setiap tahun mengalami peningkatan dikarenakan adanya upaya perbaikan mutu ternak yang akan di ekspor. Peningkatan yang signifikan di tahun 2024 karena adanya penerapan sertifikasi GBP/GFP bagi pelaku usaha yang akan melaksanakan ekspor.

Realisasi pelaksanaan ekspor tahun 2020 hingga 2024 jumlah ternak yang di ekspor tidak ada yang di tolak oleh negara tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas ternak telah memenuhi standar mutu ekspor

negara tujuan. Pada tahun 2023 realisasi lebih rendah dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh penurunan permintaan dari negara tujuan sehingga rekomendasi pengajuan tidak sepenuhnya di realisasikan.

### 1.3.2. Terpenuhinya Populasi Ternak Sesuai Kebutuhan

Untuk pemenuhan kebutuhan produksi daging bersumber dari beberapa komoditas yang dikembangkan yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik dan babi. Capaian populasi ternak sesuai kebutuhan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Ternak Ruminansia dan Babi

Dinamika populasi yang ada sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik permintaan atau kebutuhan dengan tingkat konsumsi serta faktor lain seperti terjadinya wabah Covid yang terjadi pada kurun waktu periode tersebut (Tabel 3).

Tabel 3. Realisasi Populasi Ternak Siap Potong 2020-2024

No	Komoditas	T/R	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi siap potong	T	2.142.648	2.223.000	2.312.239	2.411.252	2.520.996
		R	2.508.440	2.208.378	2.416.093	2.347.422	2.472.154
2	Kerbau siap potong	T	130.162	131.333	132.741	134.478	136.559
		R	128.375	103.224	106.623	105.836	104.515
3	Kambing siap potong	T	3.977.698	4.019.912	4.062.127	4.105.137	4.148.945
		R	4.776.933	4.304.487	4.541.150	4.206.965	4.171.957
4	Domba siap potong	T	4.629.869	4.680.526	4.731.183	4.782.796	4.834.409
		R	4.635.078	3.785.766	3.734.430	3.683.219	3.346.370
5	Babi	T	3.995.403	4.037.355	4.079.747	4.122.584	4.165.871
		R	4.083.060	4.037.355	3.900.858	2.318.252	2.029.864

Keterangan: T= Target, R=Realisasi

Berdasarkan tabel 3 capaian target dan realisasi dari masing-masing komoditas dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1) Sapi siap potong

Target Jumlah populasi ternak sapi siap potong sesuai kebutuhan produksi mengalami peningkatan dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi sehingga diperlukan peningkatan populasi sapi sebagai penghasil daging atau penyuplai kebutuhan protein hewani. Realisasi Jumlah populasi ternak sapi siap potong sesuai kebutuhan produksi tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat dikarenakan

Pandemi Covid. Realisasi Jumlah populasi ternak sapi siap potong sesuai kebutuhan produksi tahun 2022 ke 2023 adanya penurunan populasi ternak sapi akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

2) Kerbau siap potong

Target Jumlah populasi ternak kerbau siap potong sesuai kebutuhan produksi mengalami peningkatan dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi sehingga diperlukan peningkatan populasi kerbau sebagai penghasil daging atau penyuplai kebutuhan protein hewani. Realisasi jumlah populasi ternak kerbau siap potong sesuai kebutuhan produksi dari tahun 2020 ke 2024 mengalami penurunan dikarenakan kurangnya intervensi program maupun anggaran untuk pengembangan ternak kerbau sehingga mengakibatkan pada penurunan kualitas performa bibit ternak kerbau, selain itu di masyarakat kerbau banyak di gunakan untuk kegiatan adat istiadat bukan sebagai pangan protein harian.

3) Kambing siap potong

Target Jumlah populasi ternak kambing siap potong sesuai kebutuhan produksi mengalami peningkatan dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi sehingga diperlukan peningkatan populasi kambing sebagai penghasil daging atau penyuplai kebutuhan protein hewani. Realisasi jumlah populasi ternak kambing siap potong sesuai kebutuhan produksi dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan dikarenakan pada periode tahun tersebut Indonesia mengalami kondisi Pandemi Covid19 sehingga berpengaruh pada penurunan konsumsi rumah tangga terutama daging kambing dan pembatasan mobilitas masyarakat berpengaruh pada operasional HOREKA (Hotel Restoran dan Kafe) sehingga menurunkan permintaan produk olahan daging kambing. Periode tahun 2022 mengalami kenaikan seiring dengan mulai membaiknya kondisi Pandemi covid 19.

Pada periode tahun 2023-2024 cenderung mengalami penurunan kembali dikarenakan penurunan daya beli masyarakat. Kombinasi dari kondisi perekonomian yang lebih sulit seperti tutupnya banyak pabrik besar yang diikuti pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, besarnya pengeluaran masyarakat akibat harga kebutuhan pokok yang semakin mahal dan pengeluaran besar untuk pendidikan anak di tahun ajaran baru, serta harga hewan ternak yang semakin mahal, membuat penjualan hewan kurban tahun ini menjadi lesu (Sumber: IDEAS). Daya beli Masyarakat yang menurun ini mengakibatkan kecenderungan masyarakat akan mengubah pola konsumsi dari daging merah ke

daging putih atau dari daging kambing kedaging ayam yang lebih murah.

4) Domba siap potong

Target Jumlah populasi ternak domba siap potong sesuai kebutuhan produksi mengalami peningkatan dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi sehingga diperlukan peningkatan populasi kambing sebagai penghasil daging atau penyuplai kebutuhan protein hewani.

Realisasi jumlah populasi ternak domba siap potong sesuai kebutuhan produksi dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan dikarenakan pada periode tahun tersebut Indonesia mengalami kondisi Pandemi Covid 19 sehingga berpengaruh pada penurunan konsumsi rumah tangga terutama daging domba dan pembatasan mobilitas masyarakat berpengaruh pada operasional HOREKA (Hotel Restoran dan Kafe) sehingga menurunkan permintaan produk olahan daging domba. Pada tahun 2022-2024 cenderung mengalami penurunan dikarenakan penurunan daya beli masyarakat, kombinasi dari kondisi perekonomian yang lebih sulit seperti tutupnya banyak pabrik besar yang diikuti pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, besarnya pengeluaran masyarakat akibat harga kebutuhan pokok yang semakin mahal dan pengeluaran besar untuk pendidikan anak di tahun ajaran baru, serta harga hewan ternak yang semakin mahal, membuat penjualan hewan kurban tahun ini menjadi lesu (Sumber: IDEAS). Daya beli Masyarakat yang menurun ini mengakibatkan kecenderungan masyarakat akan mengubah pola konsumsi dari daging merah ke daging putih atau dari daging domba kedaging ayam yang lebih murah.

5) Babi

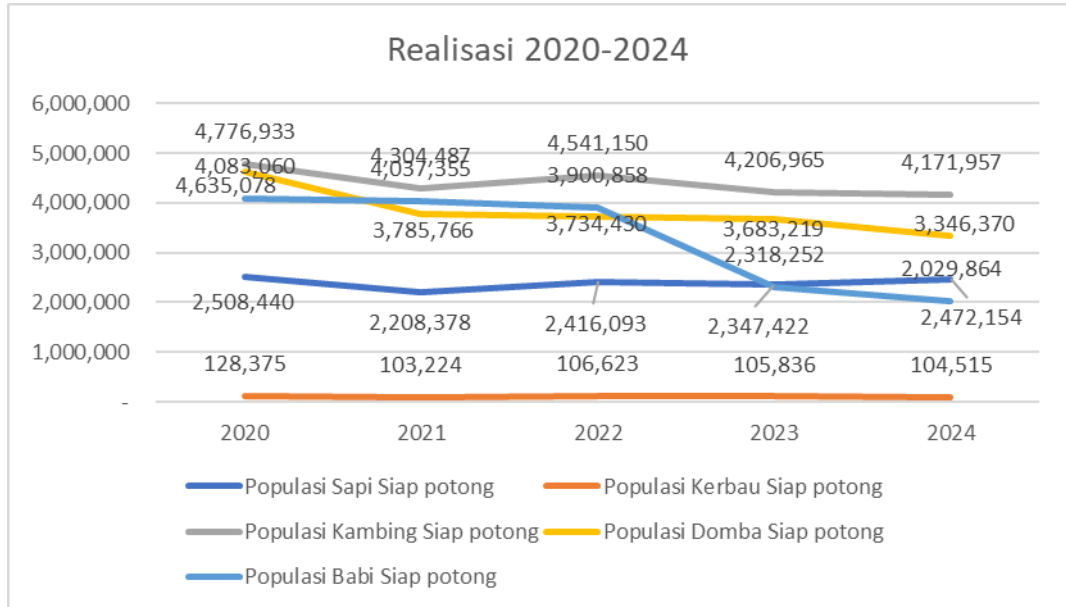
Target yang ditetapkan cenderung mengalami peningkatan karena sudah memperhitungkan peningkatan jumlah penduduk dan tran konsumsi yang semakin meningkat.

Kendala dan permasalahan dalam pengembangan ternak babi antara lain:

- a. Wabah penyakit ASF di beberapa daerah sentra dan tidak tersediannya vaksin ASF di dalam negeri sehingga memerlukan waktu dalam penanganan penyakit;
- b. Pembatasan lalu lintas ternak babi baik nasional dan pemberhentian sementara ekspor babi ke beberapa negara konsumen reguler;
- c. Belum adanya regulasi yang mengatur babi potong bakalan;
- d. Kurangnya bibit babi berkualitas sehingga produktifitas yang

- dihasilkan tidak maksimal; dan
- e. Faktor sosial budaya dan lingkungan dalam pengembangan babi.

Capaian realisasi ternak ruminansia dan babi siap potong tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam grafik berikut:



**Gambar 1.** Capaian Populasi Ternak Sesuai Kebutuhan Produksi (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi)

6) Ayam dan Itik

Pada Renstra Dit. Bitpro tahun 2020-2024 telah ditetapkan target ayam dan itik siap potong dalam mendukung kebutuhan produksi daging. Capaian target dan realisasi sebagaimana tabel 4:

Tabel 4. Target dan Realisasi Ayam dan Itik Siap Potong Tahun 2020-2024

No	Komoditas	T/R	Tahun (juta ekor)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ayam siap potong	T	3.004,48	3.097,91	3.191,34	3.284,78	3.378,21
		R	2.790,66	2.889,21	3.443,39	3.532,12	3.572,91
2	Itik siap potong	T	30,77	31,73	32,68	33,61	34,59
		R	37,61	32,22	34,14	33,03	33,05

Keterangan: T= Target, R=Realisasi

Capaian populasi ternak ayam ras pada tahun 2020-2021 dipengaruhi oleh beberapa hal seperti mulai terjadinya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan konsumsi dan menurunnya konsumsi dan daya beli masyarakat pada komoditas daging ayam ras. Mengantisipasi hal tersebut pemerintah melakukan beberapa upaya stabilisasi perunggsan nasional melalui: 1). cutting HE umur 19 hari, 2).

penyerapan *livebird* internal perusahaan sesuai proporsi FS yang dihasilkan, dan pengendalian akhir dini PS di Pulau Jawa. Selain itu pemerintah menghimbau dilakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk pembagian telur HE, Karkas Ayam Ras, dan/atau Produk Olahan kepada semua lapisan masyarakat terutama tenaga medis dan masyarakat lainnya di seluruh wilayah terdampak Covid-19.

Pada tahun 2022 selain Pandemi Covid yang masih terjadi serta masih melemahnya daya beli Masyarakat yang berpengaruh pada konsumsi daging ayam hal lainnya yang dilakukan dalam pengendalian produksi antara lain Perusahaan diminta untuk melakukan penyesuaian produksi DOC sesuai dengan standing order, menjaga kualitas DOC FS sesuai SNI serta menjamin produk akhir berupa *livebird* (LB) minimal 30% dapat dipotong di Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU).

Pada tahun 2023-2024, pemerintah berupaya menjaga populasi ternak untuk mensuplai kebutuhan ayam, antara lain melalui *cutting* HE umur 19 hari, penyerapan *livebird* internal perusahaan sesuai proporsi FS yang dihasilkan, dan pengendalian akhir dini PS di Pulau Jawa. Geliat usaha peternakan ayam semakin tumbuh dengan semakin banyaknya Perusahaan pembibit atau peternak yang terlibat dalam usaha budidaya atau pembibitan ayam ras pedaging. Upaya peningkatan populasi dengan perbaikan genetik dan perbaikan manajemen pemeliharaan yang baik didukung dengan penggunaan teknologi yang baik menyebabkan populasi yang dihasilkan semakin baik dan banyak.

Target populasi ternak itik sesuai kebutuhan produksi meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran Masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi serta peningkatan permintaan yang tinggi terhadap daging itik. Untuk memenuhi produksi (daging dan telur itik) diperlukan target populasi berdasarkan struktur umur (*standing population*). Struktur umur setiap tahun sangat bergantung pada ketersediaan indukan dan aspek deman yang menyebabkan dinamisnya populasi yang dihasilkan setiap tahunnya. Permasalahan yang ada dalam pengembangan ternak itik antara lain:

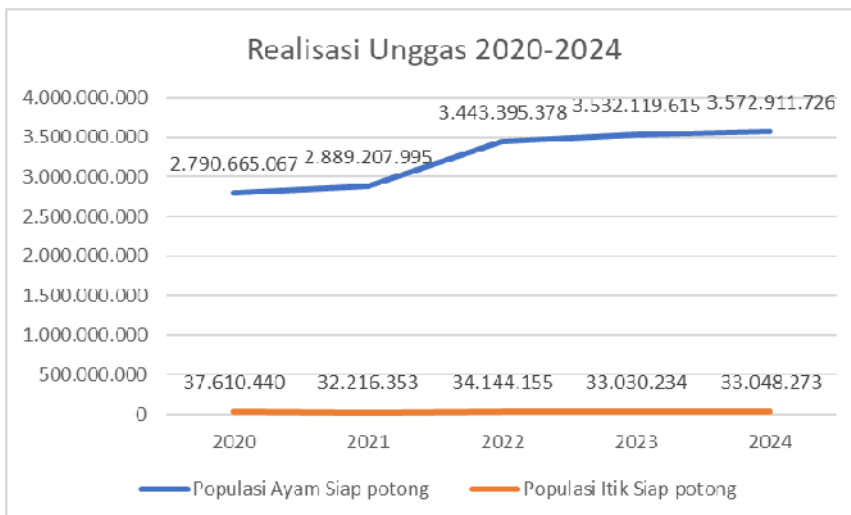
- a. Sistem pemeliharaan itik Sebagian besar dilakukan secara tradisional;
- b. Masih kurangnya pelaku usaha pembibit itik;
- c. Teknologi dalam pemeliharaan itik yang masih kurang;
- d. Kualitas bibit yang memenuhi syarat bibit masih kurang;
- e. Penyakit AI dibeberapa sentra produksi itik;
- f. Rendahnya daya tetas itik;

- g. Pandemi covid dalam kurun waktu 3 tahun;
- h. Menurunnya daya beli masyarakat; dan
- i. Harga bahan pakan yang digunakan masih fluktuatif dan tidak stabil.

Hal-hal pendukung keberhasilan peningkatan populasi ternak itik antara lain:

- a. Adanya kegiatan pengembangan ternak unggas (itik) pada tahun 2020-2024.
- b. Kegiatan pengembangan ternak unggas di lokasi Food Estate tahun 2023.
- c. Pengembangan *Integrated farming* disinkronkan dengan pengembangan ternak itik.

Capaian realisasi ternak ayam dan itik siap potong tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam grafik berikut:



**Gambar 2.** Capaian Populasi Ternak Sesuai Kebutuhan Produksi (Ayam dan Itik)

### 1.3.3. Terpenuhinya Bibit Ternak Sesuai Kebutuhan Produksi

Bibit ternak sesuai kebutuhan meliputi sapi potong, kerbau, kambing, ayam dan itik yang dikembangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbibitan dan produksi ternak Ditjen PKH. Pada Renstra Dit. Bitpro Tahun 2020-2024 telah ditetapkan target produksi bibit ternak dengan capaian yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Target dan Realisasi Bibit Ternak Sesuai Kebutuhan produksi Tahun 2020-2024

No	Komoditas Bibit	T/R	Tahun				
			2020 <sup>1)</sup>	2021	2022	2023	2024 <sup>2)</sup>
1	Sapi	T	-	1.309	1.471	1.660	1.913

No	Komoditas Bibit potong	T/R	Tahun				
			2020 <sup>*)</sup>	2021	2022	2023	2024 <sup>**)</sup>
		R	-	1.339	1.955	1.954	388
2	Kerbau	T	-	94	99	99	106
		R	-	70	66	75	85
3	Kambing	T	-	526	610	708	821
		R	-	877	1.163	963	235
4	Ayam	T	-	617.947	772.716	1.004.811	1.004.871
		R	-	433.174	588.812	539.683	31.543
5	Itik	T	-	781.375	792.538	861.156	873.117
		R	-	730.922	765.376	753.056	170.679
6	Babi	T	-	-	-	1.342	1.665
		R	-	-	707	-	100

Keterangan:

T: Target, R: Realisasi

\*) terjadi perubahan indikator dari jumlah betina produktif menjadi jumlah kelahiran calon bibit

\*\*\*) terjadi perubahan indikator dari jumlah kelahiran calon bibit menjadi bibit terseleksi sesuai SNI dan/atau bersertifikat

#### a. Bibit sapi potong

Bibit sapi potong diproduksi oleh BPTU HPT Indrapuri, BPTU HPT Padang Mangatas, BPTU HPT Sembawa, BPTU HPT Denpasar, BPTU HPT Pelaihari dan BET Cipelang. Capaian realisasi bibit sapi potong telah memenuhi target yang tercantum pada Renstra. Keberhasilan ini didukung oleh kegiatan monitoring dan pembinaan untuk memantau proses produksi dan capaian kinerja di unit pelaksana teknis. Selain itu perbaikan sarana prasarana di beberapa UPT melalui kegiatan SBSN serta dalam rangka memperbaiki pendataan ternak di balai maka dilakukan penandaan ternak melalui aplikasi identik PKH. Peningkatan kapasitas SDM juga merupakan salah satu pendukung bagi UPT untuk dapat meningkatkan produksi bibit ternak di balai.

#### b. Kerbau

Capaian realisasi bibit kerbau potong masih belum memenuhi target yang tercantum pada Renstra. Melalui perbaikan sarana prasarana di beberapa UPT melalui kegiatan SBSN dan optimalisasi lahan dalam upaya penambahan kapasitas bibit yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan produksi bibit di tahun berikutnya. Selain itu dalam rangka memperbaiki pendataan ternak di balai maka dilakukan penandaan ternak melalui aplikasi identikPKH. Peningkatan kapasitas SDM juga merupakan salah satu pendukung bagi UPT untuk dapat meningkatkan produksi bibit ternak di balai.

c. Kambing

Capaian realisasi bibit kambing telah memenuhi target yang tercantum pada Renstra. Keberhasilan ini di dukung oleh kegiatan monitoring dan pembinaan untuk memantau proses produksi dan capaian kinerja di unit pelaksana teknis. Selain itu perbaikan sarana prasarana di beberapa UPT dalam upaya penambahan kapasitas bibit yang di hasilkan. Penerapan GBP dan tersedianya SNI Rumpun Kambing sesuai produk yang akan di hasilkan serta peningkatan kapasitas SDM juga merupakan pendukung bagi UPT untuk dapat meningkatkan produksi bibit ternak di balai.

d. Ayam

Capaian realisasi bibit ayam belum memenuhi target yang tercantum pada Renstra. Hal ini dipengaruhi belum tersedianya fasilitas sarana pembibitan yang sesuai dengan kemajuan teknologi dalam memproduksi bibit ayam, kedepan diharapkan peningkatan sarana dan prasarana perbibitan. Selain itu perlu adanya penambahan kapasitas SDM, Monitoring dan pembinaan secara lebih intensif. Penerapan GBP dan tersedianya SNI bibit sesuai produk juga merupakan pendukung bagi UPT untuk dapat meningkatkan produksi bibit ternak di balai.

e. Itik

Capaian realisasi bibit itik belum memenuhi target yang tercantum pada Renstra. Hal ini dipengaruhi belum tersedianya fasilitas sarana pembibitan yang sesuai dengan kemajuan teknologi dalam memproduksi bibit itik, kedepan diharapkan adanya peningkatan sarana dan prasarana perbibitan. Selain itu perlu adanya penambahan kapasitas SDM, Monitoring dan pembinaan secara lebih intensif. Penerapan GBP dan tersedianya SNI bibit sesuai produk juga merupakan pendukung bagi UPT untuk dapat meningkatkan produksi bibit ternak di balai.

f. Babi

Pada Renstra tahun 2020-2022 tidak ditetapkan target untuk produksi bibit babi, karena BPTU-HPT Siborongborong yang melaksanakan fungsi pembibitan babi terkena wabah ASF. Realisasi bibit babi pada kurun waktu 2022-2024 mengalami fluktuasi dikarenakan merebaknya ASF ternak babi. Pada tahun 2022 terdapat pengadaan babi sebanyak 100 ekor untuk *sentinel*, sehingga terdapat produksi sebanyak 707 ekor. Sedangkan pada tahun 2023 kembali terjadi wabah penyakit ASF sehingga dilakukan depopulasi. Dari sisa ternak tahun 2023 telah terdapat kelahiran 102 ekor yang terseleksi menjadi 100 ekor di tahun 2024. Upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran

penyakit ASF maka dilakukan perbaikan aspek *biosecurity* baik berupa sarana prasarana antara lain penyediaan kandang isolasi bagi ternak yang sakit dan penguatan peyediaan obat-obatan serta disinfektan maupun prosedur (SOP).

#### 1.3.4. Tersedianya Standar Benih Ternak dan Bibit Ternak Sesuai Kebutuhan

Standar bibit/benih ternak dimaksudkan sebagai acuan oleh pelaku usaha pembibitan dalam memproduksi bibit dan benih ternak. Pada tahun 2020-2024 ditetapkan target dan telah terealisasi sebagaimana dalam tabel 6.

Tabel 6. Target dan Realisasi Rasio Standar Benih dan Bibit Ternak yang Dihasilkan pada Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Target (%)	90	90	90	90	90
2	Realisasi (%)	100	90	100	100	100

Target rasio standar bibit ternak jangka menengah tahun 2024 (renstra 2024) sebesar 90%, pada tahun 2024 terealisasi 100%. Pengukuran realisasi berupa perbandingan antara jumlah pengajuan (PNPS) dengan jumlah output RSNI yang disampaikan ke BSN pada tahun berjalan. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024 semua target telah terpenuhi dengan jumlah total sebanyak 33 RSNI bibit ternak.

#### 1.3.5. Meningkatnya Ketersediaan Benih dan Bibit Bermutu

Ketersediaan bibit/benih yang bersertifikat memberikan jaminan kualitas bibit/benih dalam memenuhi permintaan/kebutuhan masyarakat untuk mendukung peningkatan produksi pangan hewani (daging, telur, susu). Realisasi rasio benih dan bibit yang bersertifikat dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Realisasi Rasio Benih dan Bibit yang Bersertifikat

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Target (%)	70	75	80	85	90
2	Realisasi (%)	92	80	89	100	100

Penerbitan sertifikat benih dan bibit oleh LSPPro pada tahun 2020-2024 melebihi target yang direncanakan. Hal ini karena penerapan *Good Breeding Practices* sudah meningkat di produsen sehingga meningkatkan kualitas dalam produksi benih dan bibit ternak.

### 1.3.6. Meningkatnya Produksi Susu untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Nasional

Ketersediaan susu segar untuk memenuhi kebutuhan protein nasional tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel 8.

Tabel 8. Realisasi produksi Susu Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Target (ton)	968.150	973.470	979.460	986.370	994.750
2	Realisasi (ton)	947.685	946.388	824.273	787.374	808.325

Produksi susu dari tahun 2020 s.d 2023 mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh: 1) Penyakit Hewan khususnya di tahun 2022 yang berdampak pada penurunan populasi dan produksi susu; 2) Isu perubahan iklim yang mengakibatkan terbatasnya sumber pakan ternak; 3) Fluktuasi harga susu yang menurunkan minat untuk beternak sapi perah. Tantangan seperti keterbatasan lahan untuk kandang dan pakan hijauan, serta minimnya pemahaman peternak terhadap praktik peternakan yang baik, masih menjadi hambatan dalam pengembangan produksi susu segar dalam negeri. Sementara produksi susu tahun 2023 ke 2024 mengalami peningkatan yang sebabkan semakin terkendalinya PMK dan penambahan populasi melalui impor.

Produksi susu sangat tergantung pada jumlah betina laktasi dan produktifitas susu per ekor. Target dan realisasi dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Target dan Realisasi Jumlah Betina Laktasi Ternak Perah Sesuai Kebutuhan Produksi Susu Tahun 2021 - 2024

NO	URAIAN	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1	Target (ekor)	254.967	261.262	268.029	275.760
2	Realisasi (ekor)	248.970	283.359	201.060	228.184
3	Persentase (%)	97,65	108,46	75,01	82,75

Pada tahun 2020 ke 2021, jumlah betina laktasi sapi perah di Indonesia mengalami peningkatan disebabkan oleh implementasi program pemerintah seperti Upsus Siwab dan Sikomandan atau optimalisasi reproduksi, yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak sapi perah melalui inseminasi buatan dan teknologi reproduksi lainnya.

Jumlah betina laktasi tahun 2023 ke 2024 mengalami peningkatan yang disebabkan semakin terkendalinya PMK, sehingga pelaku usaha kembali meningkatkan populasi ternak melalui import sapi perah dan benih sapi perah. Dalam mendukung produksi susu dalam negeri diperlukan ketersediaan bibit sapi perah, dalam hal ini diproduksi oleh BBPTU HPT Baturraden. Target dan realisasi produksi bibit sapi perah tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Target dan Realisasi Produksi Bibit Sapi Perah Tahun 2021 - 2024

NO	URAIAN	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1	Target (ekor)	450	1.000	1.000	1.000
2	Realisasi (ekor)	425	332	543	556

Realisasi produksi bibit sapi perah dari tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi, hal ini dapat disebabkan oleh: 1) Pakan yang tidak memadai. Ketersediaan dan kualitas pakan yang buruk (kekurangan nutrisi tertentu) dapat menghambat perkembangan dan produktivitas sapi perah, termasuk bibit; 2) Isu perubahan iklim. Suhu tinggi dan perubahan musim dapat menyebabkan stres panas pada sapi, yang berpengaruh terhadap tingkat kesuburan dan produksi bibit; dan 3) penyakit hewan.

### 1.3.7. Meningkatkan Produksi Telur untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Nasional

Produksi telur dalam kegiatan ini berasal dari ayam ras petelur. Ketersediaan telur untuk memenuhi kebutuhan protein nasional tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel 11.

Tabel 11. Realisasi Produksi Telur Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Target (ton)	4.795.165	4.896.101	4.996.643	5.096.696	5.198.982
2	Realisasi (ton)	5.044.395	5.155.998	6.335.453	6.886.986	6.581.605
3	Persentase (%)	105.20	105.31	126.79	135.13	126.59

Target yang ditetapkan cenderung mengalami peningkatan karena sudah memperhitungkan peningkatan jumlah penduduk dan tren konsumsi yang semakin meningkat. Dalam periode 2020-2024 target tersebut sudah terealisasi bahkan melebihi dari 100%.

Berdasarkan tren produksi telur pada tahun 2020-2023 mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan pada tahun 2023-2024 hal ini dikarenakan daya beli masyarakat cenderung menurun. Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi produksi telur antara lain:

- a. Perbaikan genetik dan kualitas bibit ayam ras petelur difokuskan menggunakan bibit dengan produktifitas tinggi.
- b. Perbaikan kualitas pakan dengan menitik beratkan pada komposisi nutrisi seimbang dengan menggunakan bahan pakan lokal.
- c. Perubahan pola pemeliharaan dengan menggunakan teknologi guna meningkatkan efisiensi produksi.
- d. Kesulitan mendapatkan bahan baku pakan khususnya jagung yang berdampak pada tingginya biaya produksi.
- e. Wabah flu burung H5N1 dan penyakit ND menjadi ancaman dan mempengaruhi produksi.
- f. Pandemi Covid berakibat pada penurunan produksi karena pembatasan aktivitas ekonomi utamanya pada sektor hotel, restoran dan ketring (HOREKA). Selain itu terganggunya distribusi rantai pasok terhadap bahan pakan dan hasil produksi.

Tabel 12. Realiasi Populasi Ayam Ras Petelur Sesuai Kebutuhan Produksi Telur Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Target (ekor)	267.913.341	273.553.827	279.170.226	284.760.370	290.475.270
2	Realisasi (ekor)	281.108.401	286.365.351	351.733.762	353.030.589	301.274.645
3	Persentase (%)	104.93	104.68	125.99	123.97	103.72

Populasi ayam ras petelur sesuai produksi kebutuhan telur yang dimaksudkan adalah betina produktif ayam ras petelur. Target yang ditetapkan mengalami peningkatan karena memperhitungkan peningkatan jumlah penduduk dan tren konsumsi yang semakin meningkat. Target yang telah ditetapkan dapat terealisasi lebih dari 100%.

Berdasarkan tabel 12. tren populasi betina produktif ayam ras petelur mengalami peningkatan pada tahun 2020-2023, namun pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan.

Beberapa hal yang mempengaruhi fluktuasi capaian produksi ayam ras petelur antara lain:

- a. Harga pakan yang menyumbang 70% dari biaya produksi seperti jagung, dan kedelai.
- b. Perubahan pola konsumsi masyarakat, termasuk peningkatan konsumsi protein hewani, dapat memengaruhi produksi dan populasi

ayam petelur.

- c. Pandemi yang terjadi pada tahun 2020–2021 mengurangi daya beli masyarakat dan memengaruhi permintaan telur di pasar. Hal ini membuat banyak peternak mengurangi populasi ternaknya.
- d. Pemerintah mendorong agar peternak dapat meningkatkan produktivitas guna menopang program pemerintah yang akan dijalankan yaitu MBG yang membutuhkan telur atau protein hewani.

### 1.3.8. Tersedianya Sarana Prasarana Perbibitan dan Produksi Ternak

Tabel 13. Realisasi Tingkat Kemanfaatan Saranan Prasarana Perbibitan dan Produksi Ternak Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Target (%)	90	91	92	93	95
2	Realisasi (%)	100	100	98,97	93,04	98,00

Target tingkat kemanfaatan sarana prasarana perbibitan dan produksi ternak (Tabel 13) mengalami peningkatan setiap tahun karena diharapkan bantuan pengadaan sarana oleh Ditjen. PKH yang dalam hal ini adalah pengadaan kontainer dapat termanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan layanan optimalisasi reproduksi.

Realisasi tingkat kemanfaatan sarana prasarana perbibitan dan produksi ternak dari tahun 2020 ke 2024 secara pertahun dianggap berhasil. Hal ini dianggap bahwa pemanfaatan sarana berupa kontainer sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan layanan optimalisasi reproduksi di daerah atau lapangan. Ketersediaan sarana berupa container diharapkan ada Upaya yang serius dari berbagai pihak baik Pusat maupun daerah sehingga perlu ada sinergi pembiayaan baik melalui APBN maupun APBD.

### 1.4 Potensi dan Permasalahan

Untuk melihat potensi dan permasalahan pengembangan dan produksi ternak dapat dilihat dari aspek lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Lingkungan strategis internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh penyelenggaraan pembangunan perbibitan dan produksi ternak, sedangkan pada aspek eksternal penyelenggaraan perbibitan dan produksi ternak akan dipengaruhi oleh berbagai ancaman dari luar. Aspek ini memungkinkan terjadinya peluang-peluang yang mungkin timbul. Kemudian kedua faktor tersebut dianalisis dengan metoda SWOT dengan melihat beberapa aspek internal dan eksternal yang penting untuk dijadikan strategi operasional, visi misi Dit. Bitpro.

### 1.4.1. Potensi

Berdasarkan hasil uraian capaian kinerja perbibitan dan produksi ternak sebelumnya maka perlu dirumuskan beberapa potensi yang meliputi kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Dit. Bitpro dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai visi dan misi Ditjen PKH tahun 2025-2029. Berikut adalah kekuatan yang dimiliki oleh Dit. Bitpro yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, yaitu:

#### 1. Kekayaan sumber daya genetik ternak lokal

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya genetik ternak lokal yang mendukung penyediaan pangan asal hewan. Rumpun/galur yang sudah ditetapkan atau dilepas melalui surat keputusan Menteri pertanian, terdiri dari 25 rumpun/galur sapi, 9 rumpun/galur kerbau, 18 rumpun/galur kambing, 14 rumpun/galur domba, 29 rumpun/galur ayam, 18 rumpun/galur itik, 4 rumpun/galur kuda, 2 rumpun/galur kelinci, dan 1 rumpun/galur rusa. Keanekaragaman genetik ini merupakan kekuatan strategis dalam menjaga ketahanan bibit nasional dan kemandirian sumber daya genetik di tengah ketergantungan global terhadap impor bibit. Potensi ini dapat dikembangkan untuk menghasilkan varietas ternak unggul yang adaptif terhadap lingkungan lokal, efisien dalam pakan, serta tahan terhadap penyakit endemik.

#### 2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak

Peningkatan produksi dan produktivitas ternak merupakan kunci untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat. Dengan meningkatkan produksi sumber pangan bergizi seperti daging, telur, dan susu, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor. Populasi ternak penghasil daging, telur, dan susu perlu ditingkatkan melalui program pembibitan dan budidaya yang baik dengan memanfaatkan sumber daya genetik ternak lokal serta importasi bibit ternak. Selain itu, investasi di sektor peternakan harus ditingkatkan khususnya untuk menambah populasi dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas ternak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak.

#### 3. Penerapan Praktik Peternakan yang Baik

Penerapan praktik peternakan yang baik, seperti *Good Breeding Practices* (GBP) *Good Farming Practices* (GFP) dan *Good Hatchery Practice* (GHP) sangat penting untuk menghasilkan ternak yang sehat dan produktif. Praktik ini mencakup manajemen pembibitan, pemeliharaan, pemberian pakan berkualitas, dan penerapan biosekuriti yang ketat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, peternak dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ternak mereka. Selain itu,

jaminan usaha peternakan dari hulu ke hilir harus diperkuat untuk menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan dan efisien.

#### **4. Sistem Perbibitan Ternak Nasional**

Sistem Perbibitan Ternak Nasional telah tertuang dalam PP 48 Tahun 2011 sebagai acuan kebijakan dalam menyediakan, peredaran, pengawasan benih/bibit ternak serta kelembagaan perbibitan. Perbibitan yang dimaksud meliputi ternak asli, lokal dan ternak introduksi.

#### **1.4.2. Peluang**

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dit. Bitpro dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Tingginya permintaan produk peternakan di masyarakat**

Permintaan terhadap produk peternakan, seperti daging, telur, dan susu, terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan per kapita, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi protein hewani. Tren ini memberikan peluang besar bagi Ditjen PKH untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri, memperkuat sistem logistik pangan hewani, dan memperluas pasar domestik maupun ekspor. Permintaan yang tinggi juga menjadi insentif bagi pengembangan agribisnis peternakan yang lebih modern dan efisien.

##### **2. Kemajuan teknologi dan informasi dibidang peternakan**

Perkembangan teknologi digital dan bioteknologi memberikan peluang besar bagi transformasi sektor peternakan. Pemanfaatan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Big Data Analytics*, dan sistem informasi geografis (GIS) memungkinkan peningkatan efisiensi produksi, serta penguatan sistem *traceability* produk asal hewan. Di sisi bioteknologi reproduksi seperti teknologi sexing semen, Transfer Embryo dan genom editing dan membuka ruang peningkatan produktivitas ternak. Transformasi digital ini sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju *pertanian cerdas (smart agriculture)* dan *peternakan presisi (precision livestock farming)* yang berdaya saing dan berkelanjutan.

### **3. Kerja sama internasional dan dukungan mitra pembangunan**

Peluang kerja sama internasional dengan lembaga multilateral dan mitra pembangunan semakin terbuka luas dalam mendukung penguatan sektor peternakan dan kesehatan hewan. Dukungan teknis dan pembiayaan dari lembaga seperti FAO, IFAD, JICA, serta mitra bilateral lainnya berperan penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas riset dan inovasi, serta mempercepat adopsi teknologi baru. Program kerja sama internasional juga berkontribusi terhadap peningkatan sistem kesehatan hewan nasional, penanggulangan zoonosis, dan pengembangan peternakan berkelanjutan yang selaras dengan pendekatan *One Health*. Kolaborasi ini menjadi peluang strategis untuk mempercepat modernisasi sektor peternakan Indonesia.

### **4. Dukungan swasta dan masyarakat terhadap usaha peternakan**

Semakin meningkatnya minat sektor swasta, koperasi, dan masyarakat terhadap usaha peternakan modern membuka peluang besar bagi penguatan nilai tambah dan daya saing usaha budidaya dan produksi ternak.

### **5. Jumlah Rumah Tangga Peternakan**

Usaha peternakan dilakukan oleh masyarakat secara polivalen (terpadu) dengan kegiatan ekonomi lainnya dibidang pertanian. Dengan banyaknya masyarakat melakukan usaha peternakan walaupun dengan skala yang kecil dan dikelola secara sambilan, usaha peternakan ini memiliki peran dalam produksi ternak. Pada tahun 2023 jumlah rumah tangga usaha peternakan 12,04 juta rumah tangga atau 44% dari jumlah rumah tangga usaha pertanian (Sensus Pertanian, 2023).

### **6. Sumber Daya Genetik Hewan**

Di sektor peternakan, keanekaragaman genetik spesies dan rumpun ternak di Indonesia merupakan ekspresi dari adaptasi berbagai agroekosistem. Sumber daya genetik hewan lokal pada umumnya mempunyai kemampuan beradaptasi, dan memiliki daya cerna terhadap pakan yang cenderung baik. Keberagaman sumber daya ternak yang tersebar di wilayah-wilayah memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan secara ekonomis, dan meningkatkan penyediaan kebutuhan bibit dan produksi ternak mendukung pemenuhan kebutuhan protein hewani yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia.

### **7. Pasar Domestik dan Luar Negeri**

Pada lima tahun mendatang diprediksi Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk dan pada tahun 2030 proporsi usia

produktif mencapai 70% dari total populasi. Hal ini menjadi peluang pemenuhan pangsa pasar protein hewani. Selain itu, pasar luar negeri untuk komoditas kambing, domba, babi dan unggas yang masih sangat besar.

### **1.4.3. Permasalahan**

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, maka permasalahan dapat dijabarkan dalam kelemahan dan ancaman dihadapi oleh Dit. Bitpro. Berikut ini beberapa kelemahan dari Dit. Bitpro yaitu:

#### **1. Pengawasan dan Regulasi**

Sistem pengawasan terhadap benih, bibit, dan ternak belum memadai sehingga perlu ditingkatkan untuk memastikan kesesuaian terhadap standar komoditas ternak yang ada. Disisi lain regulasi yang menjadi acuan kegiatan perbibitan dan produksi ternak belum mengikuti perkembangan teknologi dan kondisi peternakan saat ini.

#### **2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia peternakan dan kesehatan hewan**

Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang perbibitan dan produksi ternak (pengawas bibit ternak, petugas reproduksi, dan tenaga lapangan lainnya) masih belum memadai, baik dari segi jumlah maupun pemerataan antar wilayah. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pembinaan teknis peternakan. Sumber Daya Manusia yang mendukung pembangunan peternakan dalam usaha peternakan memiliki kompetensi yang beragam, dan didominasi oleh usia yang tidak produktif.

#### **3. Belum optimalnya sistem data dan informasi peternakan nasional**

Sistem data dan informasi di sektor peternakan belum sepenuhnya terintegrasi antara pusat dan daerah. Data populasi, produksi, distribusi ternak, seringkali belum diperbarui secara real-time, serta masih tersebar dalam berbagai sistem yang belum saling terhubung. Selain itu, penandaan dan pendataan ternak harus dilakukan secara sistematis untuk memudahkan ketelusuran ternak. Kondisi ini menyebabkan pengambilan keputusan dan perencanaan program belum sepenuhnya berbasis pada data yang akurat dan mutakhir.

#### **4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung Perbibitan dan produksi ternak**

Sarana dan prasarana pendukung perbibitan dan produksi ternak masih terbatas jumlah dan kapasitasnya, serta belum terstandarisasi

secara teknis. Kondisi ini berpengaruh terhadap manajemen pemeliharaan, pengendalian kualitas dan efisiensi proses produksi benih, bibit dan ternak.

**5. Pola usaha yang bersifat sambilan dengan skala usaha kecil**

Usaha peternakan sebagian besar merupakan usaha peternakan rakyat dengan skala kepemilikan sebanyak 2 s.d 3 ekor per peternak dengan pola pemeliharaan secara tradisional dan lokasi yang tersebar. Selain itu usaha peternakan yang dilakukan oleh peternak merupakan usaha sampingan dan belum terintegrasi dengan sektor hilir menyebabkan usaha peternakan belum efisien.

**6. Rendahnya pemanfaatan sumberdaya genetik ternak sebagai keunggulan ekonomis**

Indonesia memiliki keanekaragaman sumberdaya genetik ternak yang tersebar di wilayah Indonesia namun belum mampu dimanfaatkan secara ekonomis dalam menghasilkan produk-produk peternakan. Untuk meningkatkan, memanfaatkan dan sekaligus menjaga kelestarian sumberdaya genetik ternak Indonesia, dilakukan upaya pengembangan kawasan sumber bibit ternak.

**1.4.4. Ancaman**

Ancaman yang harus diantisipasi oleh Dit. Bitpro dalam pengembangan Perbibitan dan Produksi Ternak antara lain:

**1. Dampak Perubahan Iklim**

Perubahan iklim menimbulkan tantangan besar bagi peternakan, seperti penurunan produktivitas Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan peningkatan kerentanan ternak terhadap penyakit. Stres pada hewan akibat cuaca ekstrem dan peningkatan virulensi agen penyakit memerlukan strategi adaptasi yang komprehensif. Penyediaan anggaran khusus untuk penanganan dampak bencana alam terhadap ternak juga menjadi kebutuhan mendesak.

**2. Penyakit Hewan**

Penyakit hewan, menjadi tantangan serius bagi usaha pembibitan dan perbibitan ternak. Penyakit hewan seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Lumpy Skin Disease* (LSD), *African Swine Fever* (ASF), dan Avian Influenza (AI) akan menurunkan populasi dan produktivitas ternak.

**3. Keterbatasan dan alih fungsi lahan peternakan**

Alih fungsi lahan menjadi pemukiman penduduk dan Sebagian besar tata ruang peternakan belum diatur khusus oleh pemerintah daerah.

Hal ini berpotensi menurunkan kapasitas pengembangan perbibitan dan produksi ternak.

#### **4. Ketergantungan impor bibit ayam ras**

Saat ini produsen GPS ayam ras dikuasai oleh dua produsen besar yang berasal dari Amerika, sehingga ketergantungan penyediaan bibit yang dapat menghasilkan produksi daging dan telur sangat tinggi. Hal ini menjadi ancaman apabila terjadi wabah atau pemberhentian impor ke Indonesia yang dapat menyebabkan gangguan pasokan dan fluktuasi harga.

### **1.5 Analisis SWOT kegiatan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak**

Dalam rangka merumuskan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Dit. Bitpro secara tepat sasaran dan berkelanjutan, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT), yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang memengaruhi kinerja perbibitan dan produksi ternak.

Aspek Internal

#### 1) Kekuatan:

- a. Kekayaan sumber daya genetik ternak lokal
- b. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak
- c. Penerapan Praktik Peternakan yang Baik
- d. Sistem Perbibitan Ternak Nasional

#### 2) Kelemahan

- a. Pengawasan dan Regulasi
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia peternakan dan kesehatan hewan
- c. Belum optimalnya sistem data dan informasi peternakan nasional
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung Perbibitan dan produksi ternak
- e. Pola usaha yang bersifat sambilan dengan skala usaha kecil
- f. Rendahnya pemanfaatan sumberdaya genetik ternak sebagai keunggulan ekonomis

Aspek Eksternal

#### 1) Peluang

- a. Tingginya permintaan produk peternakan di masyarakat Transfer Bioteknologi
- b. Kemajuan teknologi dan informasi dibidang peternakan

- c. Kerja sama internasional dan dukungan mitra pembangunan
- d. Dukungan swasta dan masyarakat terhadap usaha peternakan
- e. Jumlah Rumah Tangga Peternakan
- f. Sumber Daya Genetik Hewan
- g. Pasar Domestik dan Luar Negeri

2) Ancaman

- a. Dampak Perubahan Iklim
- b. Penyakit Hewan
- c. Keterbatasan dan alih fungsi lahan peternakan
- d. Ketergantungan impor bibit ayam ras

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sektor peternakan nasional memiliki potensi besar yang didukung oleh sumber daya genetik ternak lokal, peningkatan produksi, serta penerapan praktik peternakan yang baik. Namun, pengembangannya masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sistem data, sarana prasarana, serta dominasi usaha skala kecil. Di tengah peluang pasar dan kemajuan teknologi, sektor ini juga dihadapkan pada ancaman perubahan iklim, penyakit hewan, keterbatasan lahan, dan ketergantungan impor bibit. Oleh karena itu, penguatan perbibitan nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan optimalisasi ternak lokal menjadi kunci peningkatan kemandirian dan daya saing peternakan nasional.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK**

##### **4.1. Visi Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak**

Visi merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai organisasi di masa yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN / Bappenas) Nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*) dan merupakan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi juga merupakan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi serta *positioning* organisasi dalam pembangunan nasional. Visi harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang di dalam RPJMN, sehingga pernyataan Visi K/L harus mencantumkan Visi Presiden sebagai tujuan bersama.

Dalam mewujudkan Visi Presiden terpilih tahun 2025-2029 serta cita-cita pembangunan nasional tahun 2025-2029, maka Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, yaitu: **"Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**.

Ditjen PKH sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I harus dapat turut serta dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut. Untuk itu, maka Visi Ditjen PKH tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 adalah: **"Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia"**. Visi Ditjen PKH ini mengandung beberapa kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Peternakan**

Berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 2 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pertanian bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Berdasarkan definisi ini, maka peternakan merupakan salah satu komoditas dalam pertanian.

## 2. Kesehatan Hewan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka Kesehatan Hewan didefinisikan sebagai segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. Sedangkan hewan didefinisikan sebagai binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

## 3. Peternakan Maju

Peternakan yang maju bermakna bahwa Peternakan Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik peternakan terkini pada seluruh rantai proses utama peternakan, meliputi Penyiapan Prasarana dan Sarana peternakan, Budidaya ternak berkelanjutan, kesehatan ternak, mutu dan keamanan produk asal ternak, Pasca Panen komoditas Peternakan, Pengolahan komoditas Peternakan, serta Pemasaran komoditas Peternakan.

## 4. Peternakan Berkelanjutan

Pertanian berkelanjutan berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 1 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Peternakan merupakan salah satu komoditas, sehingga dalam praktik Peternakan berkelanjutan, sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya Peternakan berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran sektor Peternakan adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan dalam mengurangi susut pangan asal ternak.

## 5. Peternakan yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia

Peternakan yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa Pembangunan Peternakan juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan Peternakan tersebut, maka manfaat yang didapat rakyat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Komoditas Peternakan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal Peternakan.

- b. Peternakan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan peternak.
- c. Kesehatan rakyat (*one health*) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan.

Dalam mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan "Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia", khususnya kata kunci yang terkait erat dengan fungsi perbibitan dan produksi ternak, maka Visi Dit. Bitpro yaitu: "Perbibitan dan Produksi Ternak Maju, Berkelanjutan, dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia".

#### **4.2. Misi Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak**

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki beberapa misi dalam mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025-2029. Dit. Bitpro mendukung misi Ditjen PKH yang pertama yaitu: Meningkatkan produksi komoditas peternakan secara berkelanjutan dalam menghasilkan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Misi tersebut menekankan pada peningkatan produksi ternak dengan sistem budi daya peternakan berkelanjutan agar hasil peternakan dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya. Budidaya peternakan berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Peningkatan produksi dimulai dari pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG), budidaya ternak hingga produksi ternak dalam memenuhi kebutuhan pangan asal ternak dalam negeri.

Berdasarkan misi Ditjen PKH tersebut maka Misi Dit. Bitpro dirumuskan sebagai berikut:

##### **1. Meningkatkan pemenuhan potensi produksi daging, telur dan susu**

Misi ini menekankan pada usaha budidaya ternak dengan sistem budidaya peternakan berkelanjutan untuk meningkatkan populasi produksi dan produktivitas ternak, sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan potensi produksi daging, telur dan susu dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan asal ternak.

##### **2. Meningkatkan ketersediaan benih/bibit ternak bermutu berdasarkan kebutuhan produksi daging, telur dan susu**

Misi ini menekankan pada penerapan pembibitan ternak yang baik untuk penyediaan benih dan bibit ternak bermutu melalui pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik ternak Indonesia.

**3. Terlindunginya varietas unggul tanaman dan hewan**

Misi ini menekankan pada penerapan teknologi reproduksi ternak yang berhubungan erat dengan genetika ternak untuk mengelola dan meningkatkan sifat-sifat genetik ternak, seperti melalui inseminasi buatan, transfer embrio, dan analisis genomik.

**4. Tersedianya bibit/benih ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak/instansi pemerintah di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak**

Misi ini menekankan pada ketersediaan bibit/benih produksi UPT dalam memenuhi permintaan/kebutuhan masyarakat untuk melakukan usaha budidaya yang efisien mendukung peningkatan produksi pangan hewani (daging, telur, susu).

**5. Terjaminnya mutu bibit/benih ternak unggul yang beredar di wilayah kerja UPT Perbibitan dan Produksi Ternak**

Misi ini menekankan pada kualitas bibit/benih yang di tunjukan dengan bibit/benih bersertifikat sebagai jaminan mutu bibit/benih ternak unggul yang dapat di edarkan untuk pengembangan ternak di masyarakat.

**6. Meningkatkan profesionalisme dan integritas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perbibitan dan produksi ternak.**

Misi ini menekankan pada pengembangan profesionalisme dan integritas dalam pelayanan publik di bidang perbibitan dan produksi ternak merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Hal ini diwujudkan antara lain melalui: (1) pelayanan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak dan ternak, (2) penilaian kesesuaian benih/bibit ternak, (3) pengawasan benih/bibit ternak, dan lain-lain.

**4.3. Tujuan**

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki beberapa tujuan dalam mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025-2029. Dit. Bitpro mendukung tujuan Ditjen PKH yang kedua yaitu: terpenuhinya produksi komoditas peternakan.

Dalam mendukung tujuan Ditjen PKH tersebut, maka tujuan Dit. Bitpro tahun 2025 - 2029 dirumuskan sebagai berikut:

**1. Terpenuhinya potensi produksi ternak untuk produksi daging, telur dan susu**

Peningkatan produktifitas ternak dapat diindikasikan bahwa potensi produksi daging, telur dan susu juga mengalami peningkatan.

Tujuan ini memiliki tiga indikator yaitu:

- a. Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas daging.
- b. Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas telur.
- c. Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas susu.

2. Tersedianya bibit/benih ternak bermutu berdasarkan kebutuhan produksi daging telur dan susu

Melalui tersedianya benih/bibit ternak yang bermutu diharapkan kebutuhan daging, telur dan susu dapat terpenuhi dari dalam negeri. Hal ini diperkuat dengan sistem pengawasan benih/bibit ternak. Dalam rangka penjaminan mutu produk benih/bibit ternak dilakukan sertifikasi produk benih/bibit ternak dan penerapan pedoman budidaya ternak yang baik. Apabila tersedia benih/bibit ternak ruminansia, non ruminansia dan unggas, ternak betina produktif serta termanfaatkannya rumpun/galur ternak Indonesia. Dengan tujuan untuk ketersediaan benih dan bibit ternak yang berkualitas dan berkelanjutan. Pemasukan benih dan bibit juga berasal dari introduksi dari luar negeri untuk tujuan meningkatkan mutu dan keragaman genetik dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan ini memiliki tiga indikator yaitu:

- a. Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi daging.
- b. Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi telur.
- c. Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi susu.

3. Terlindunginya varietas tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas  
Melalui pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik hewan diharapkan ternak lokal/asli Indonesia dapat terlindungi. Tujuan ini memiliki satu indikator: yaitu jumlah varietas/galur unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.

4. Tersedianya benih/bibit ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak/instansi pemerintah di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak  
Pemenuhan permintaan bibit/benih dari peternak dapat dipenuhi dengan peningkatan penyediaan benih/bibit di UPT perbibitan melalui penyediaan fasilitas sarana prasarana. Tujuan memiliki satu indikator yaitu persentase

permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah.

5. Terjaminnya mutu bibit/bibit unggul yang beredar di wilayah kerja UPT Perbibitan dan produksi Ternak

Peningkatan bibit/bibit yang bermutu dan beredar sesuai standar SNI dapat memberikan jaminan produk kepada peternak dalam mendukung produksi daging, telur dan susu. Tujuan ini memiliki satu indikator yaitu persentase bibit/benih yang beredar di UPT perbibitan dan produksi ternak.

6. Terwujudnya pelayanan publik

Tujuan ini akan tercapai apabila terwujudnya pelayanan publik yang berorientasi profesional pada pelayanan prima melalui aspek kelembagaan, SDM, tata kelola aset, kebijakan, kegiatan dan penganggaran akan terus ditingkatkan.

#### **4.4. Manajemen Risiko Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Berdasarkan Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga perlu dilengkapi dengan identifikasi indikasi risiko. Identifikasi indikasi risiko adalah proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Risiko Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

Renstra Kementerian Pertanian telah memasukan penerapan manajemen risiko lingkup Kementerian Pertanian yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara kolaboratif, terstruktur, dan sistematis. Penerapan manajemen risiko di Kementerian Pertanian tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis secara efektif, dengan mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko ke dalam seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Selanjutnya sebagai unit Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memasukan MRPN dalam Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 dalam bentuk

Manajemen Risiko Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penerapan manajemen risiko memfokuskan pada risiko yang pencapaian Sasaran Program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Terpenuhinya Produksi Komoditas Peternakan. Sehingga Dit. Bitpro menyusun tabel identifikasi risiko Sasaran Kegiatan (Tabel 14) sebagai berikut:

Tabel 14. Identifikasi Risiko Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Pernyataan Resiko	Perlakuan Resiko	Penanggung Jawab
1	Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas peternakan prioritas (Daging, Susu, Telur)	Tidak tercapainya target persentase pemenuhan potensi produksi ternak prioritas sesuai target tahunan	1. Fasilitasi pembinaan kelompok masyarakat 2. Bantuan produk dan peralatan di bidang perbibitan dan produksi ternak 3. Melakukan koordinasi dengan seluruh pelaku usaha perunggasan ayam ras pedaging (GPS, PS dan FS) dalam rangka supervisi, monitoring dan evaluasi populasi dan produksi untuk menjaga ketersediaan sesuai kebutuhan.	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
2	Persentase ketersediaan bibit dan benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi peternakan	Tidak tercapainya target persentase ketersediaan bibit dan benih ternak bermutu	1. Sertifikasi benih bibit ternak 2. Sertifikasi GBP/GFP 3. Pengawasan, penerapan dan tata kelola perbibitan dan produksi ternak 4. Memastikan adanya pelaporan kegiatan Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKb), dan pelaporan kelahiran.	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
3	Persentase ketersediaan SDG Hewan tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya	Tidak tercapainya target jumlah penetapan/pelepasan rumpun/galur (R/G) hewan baru	1. Upaya perlindungan dan penambahan keragaman Sumber Daya Genetik (SDG) hewan nasional terhambat. 2. Memberikan dukungan anggaran untuk melaksanakan uji observasi dan rapat tim penilai	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
4	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak	Tidak tercapainya target persentase pemenuhan permintaan bibit/benih ternak di UPT	1. Meningkatkan produksi bibit atau benih ternak di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak	UPT Perbibitan dan Produksi Ternak

No	Sasaran Kegiatan	Pernyataan Resiko	Perlakuan Resiko	Penanggung Jawab
5	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih ternak yang beredar dari UPT Perbibitan dan Produksi Ternak	Tidak tercapainya target persentase bibit/benih bermutu (bersertifikat/terseleksi) yang diedarkan oleh UPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pelaksanaan seleksi benih bibit ternak di UPT</li> <li>2. Memastikan ternak yang diedarkan telah melalui proses sertifikasi dan/atau seleksi sesuai standar mutu (SNI).</li> <li>3. Melakukan pengawasan benih bibit ternak yang beredar</li> </ol>	UPT Perbibitan dan Produksi Ternak

Pemetaan risiko Sasaran Kegiatan Perbibitan dan Produksi Ternak dapat dilihat pada lampiran 3.

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Arah kebijakan dan kegiatan Ditjen PKH merupakan upaya strategis (strategic direction) yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan Ditjen PKH guna mencapai Visi dan Misi Ditjen PKH tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan kegiatan Ditjen PKH disusun berdasarkan kerangka strategis Ditjen PKH yang selaras dengan rumah strategi Kementerian Pertanian, seperti diuraikan pada gambar berikut ini.



**Gambar 3.** Kerangka Strategis Ditjen PKH Tahun 2025-2029

Berdasarkan kerangka strategis Ditjen PKH tahun 2025-2029 di atas, dapat dilihat bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai Ditjen PKH adalah "Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan bermanfaat bagi Rakyat Indonesia".

Tujuan akhir tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) tujuan antara, yaitu:

1. Pertumbuhan volume usaha peternakan.
2. Kemandirian pangan asal peternakan berkelanjutan.
3. Nilai tambah dan daya saing produk peternakan.
4. Kesehatan masyarakat dari penyakit dan produk hewan.

Untuk mewujudkan tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilakukan, yaitu:

1. Pilar strategis 1: Ketersediaan akses pasar peternakan

Pilar ini merupakan upaya dalam menyediakan dan/atau memperluas akses pasar peternakan, sehingga dapat meningkatkan pemasaran dan penjualan produk peternakan nasional. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam pilar strategis 1 ini adalah Arah kebijakan 1: Hilirisasi hasil peternakan bernilai tambah dan berdaya saing.

- a. Kegiatan 1.1: Pengembangan dan perluasan akses pasar domestik bagi pelaku usaha peternakan.
- b. Kegiatan 1.2: Perluasan pasar ekspor peternakan dalam memperluas market share produk peternakan Indonesia.

2. Pilar strategis 2: Budidaya ternak modern, produktif dan berkelanjutan dalam menghasilkan pangan bermutu dan aman

Pilar ini merupakan upaya dalam pelaksanaan budidaya ternak berkelanjutan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Penerapan *Good Farming Practices*, *Good Breeding Practices* maupun regulasi terkait peternakan dan kesehatan hewan terkait ternak akan dilaksanakan pada pilar strategis 2 ini. Arah kebijakan dan kegiatan pada pilar strategis 2 ini adalah Arah kebijakan 2: Produksi ternak produktif berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional ternak nasional.

- a. Kegiatan 2.1: Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) ternak.
- b. Kegiatan 2.2: Pembibitan dan produksi ternak berkelanjutan berdasarkan prioritas.
- c. Kegiatan 2.3: Memastikan ketersediaan pakan yang aman, bermutu dan terjangkau.
- d. Kegiatan 2.4: Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada ternak dalam meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak, termasuk mengurangi susut pangan asal ternak.
- e. Kegiatan 2.5: Penjaminan keamanan dan mutu produk peternakan.

3. Pilar strategis 3: Hilirisasi produk hasil peternakan

Hilirisasi merupakan upaya transformatif yang giat dilaksanakan di tingkat nasional. Indonesia tidak lagi menjual bahan baku namun menjual produk yang jadi dan siap dikonsumsi masyarakat, termasuk produk peternakan. Proses pengolahan bahan baku pada rantai pasok hulu menjadi produk yang siap konsumsi pada rantai pasok hilir akan meningkatkan nilai ekonomis produk pertanian. Pasca panen dan pengolahan yang tepat adalah proses penting untuk mendekat ke pasar (*close to market*), namun efisiensi rantai pasok adalah isu strategis berbeda. Rantai pasok yang efisien dari peternak menuju ke pengguna

akhir (*end customer*) akan memberikan dampak signifikan bagi pendapatan peternak karena proses distribusi yang berkurang dan kontrol terhadap harga jual yang meningkat.

Peningkatan daya saing produk peternakan menitikberatkan pada persaingan terhadap produk peternakan sejenis dari negara lain. Penerimaan negara tujuan ekspor terhadap produk peternakan nasional dibanding produk peternakan negara lain merupakan tolok ukur daya saing. Standar mutu yang ketat dan pemenuhan standar teknis lainnya yang dipersyaratkan perlu menjadi perhatian dalam penyiapan dan pemilihan produk serta negara tujuan ekspor.

Pilar strategis hilirisasi hasil peternakan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan. Hal ini dilaksanakan antara lain dengan: a) penanganan pasca panen, pengolahan dan diversifikasi produk dengan tujuan meningkatkan nilai tambah; b) integrasi hulu hilir dari penyediaan input produksi, budidaya, pasca panen pengolahan, penjaminan mutu dan pemasaran dengan tujuan memperkuat rantai nilai; c) pengembangan pasar baik domestik maupun ekspor.

Hilirisasi hasil peternakan selain meningkatkan nilai tambah dan daya saing peternakan juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan peternak. Pemerintah mendorong pelaku usaha peternakan melakukan hilirisasi hasil peternakan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas produk peternakan dengan memperhatikan permintaan dan preferensi pasar, serta substitusi produk peternakan impor.

Pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran diharapkan juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha peternakan. Hal ini harus didukung dengan upaya peningkatan investasi di bidang peternakan terintegrasi yang memanfaatkan produksi dalam negeri.

Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pada pilar 3 ini adalah Arah Kebijakan 3: Hilirisasi hasil peternakan bernilai tambah dan berdaya saing.

- a. Kegiatan 3.1: Pasca panen dan pengolahan produk peternakan berbasis hilirisasi.
- b. Kegiatan 3.2: Hilirisasi komoditas peternakan terintegrasi.
- c. Kegiatan 3.3: Peningkatan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

4. Pilar strategis 4: Sistem Kesehatan Hewan Nasional

Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Sikeswanas adalah tatanan kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu. Penyelenggaraan Sikeswanas merupakan salah satu upaya kesehatan melalui Kementerian Pertanian untuk berkontribusi menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit hewan melalui edukasi dan pengendalian penyakit menular.

Fungsi edukasi yang dimaksud adalah memberikan pemahaman masyarakat mengenai jenis penyakit hewan yang dapat menular kepada masyarakat. Pelaksanaan edukasi mengisi kekosongan yang selama ini terjadi dikarenakan ketiadaan fungsi dari penyelenggara negara, dalam hal ini Kementerian/Lembaga. Pengendalian penyakit hewan dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui otoritas veteriner.

Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pada pilar strategis 4 ini adalah Arah Kebijakan 4: Penegakan Sistem Kesehatan Hewan Nasional

- a. Kegiatan 4.1: Kesiapsiagaan dari penularan penyakit hewan.
- b. Kegiatan 4.2: Ketahanan dari penularan penyakit hewan.
- c. Kegiatan 4.3: Peningkatan kesadaran masyarakat dari penyakit hewan.

5. Pondasi strategis: SDM, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Ditjen PKH

Pondasi strategi merupakan dasar yang menopang berdirinya seluruh pilar strategis. Dalam konteks strategi, pondasi strategis merupakan strategic assets atau aset strategis yang harus dimiliki organisasi. Pilar strategis dalam kerangka strategi Ditjen PKH ini terdiri atas Sumber Daya Manusia, organisasi dan kelembagaan Ditjen PKH maupun tata kelola birokrasi Ditjen PKH. Arah Kebijakan dan Kegiatan yang dilakukan pada Pondasi Strategis ini adalah Arah Kebijakan 5: Birokrasi Ditjen PKH yang transparan dan akuntabel.

- a. Kegiatan 5.1: Mengembangkan modal manusia (human capital) SDM Ditjen PKH yang produktif.
- b. Kegiatan 5.2: Mengembangkan tata kelola organisasi Ditjen PKH yang tepat fungsi dan ukuran.

- c. Kegiatan 5.3: Mendukung pelaksanaan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Ditjen PKH
- d. Kegiatan 5.4: Memberikan layanan internal yang berkualitas dan berbasis digital.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak**

Arah kebijakan dan strategi Dit. Bitpro mengacu pada arah kebijakan Ditjen. PKH yang telah ditetapkan sebagai penjabaran dari Pilar strategis 2: Budidaya ternak modern, produktif dan berkelanjutan dalam menghasilkan pangan bermutu dan aman.

Arah kebijakan Dit. Bitpro dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) ternak.
2. Kegiatan Pembibitan dan produksi ternak berkelanjutan berdasarkan prioritas.

Dalam rangka mencapai tujuan dari arah kebijakan maka ditetapkan beberapa strategi. Strategi merupakan upaya yang dilakukan Dit. Bitpro untuk mencapai tujuan dari arah kebijakan, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan
  - a. Penetapan dan pelepasan rumpun atau galur hewan.
  - b. Penetapan wilayah sumber bibit.
2. Kegiatan Pembibitan dan produksi ternak berkelanjutan berdasarkan prioritas
  - a. Penyediaan bibit/benih berkualitas dan berkelanjutan.
  - b. Pengembangan kelembagaan pembibitan dan produksi ternak serta manajemen dalam penerapan GFP dan GBP pada unit usaha.
  - c. Pengembangan pembibitan dan budidaya ternak dalam mendukung pemenuhan potensi kebutuhan produksi daging, telur dan susu.
3. Proyek Strategis Nasional: Peningkatan Produksi Daging dan Susu Sapi (P2SDN), Dit. Bitpro dalam mendukung proyek strategis nasional berkontribusi dalam kemudahan dan pendampingan importasi sapi perah dan sapi pedaging.

### **3.3. Kontribusi Dit. Bitpro Terhadap Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) dalam RPJMN**

Kontribusi Dit. Bitpro terhadap Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) dalam RPJMN dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Kontribusi Dit. Bitpro Terhadap Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) dalam RPJMN

No	PN/PP/KP	KONTRIBUSI	
		DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK
1	KP 02.10.10 Produksi daging (sapi dan kerbau), (kambing dan domba), babi, ayam ras, itik)	IKP 5.1 Produksi daging	IKSK 1.1 Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas daging (%) IKSK 2.1 Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi daging (%)
2	KP 02.10.10 Produksi telur	IKP 5.2 Produksi telur	IKSK 1.2 Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas telur (%) IKSK 2.2 Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi telur (%)
3	KP 02.10.10 Produksi susu	IKP 5.3 produksi susu	IKSK 1.3 Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas susu (%) IKSK 2.3 Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi susu (%)
4	KP 02.10.18 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	IKP 02.10.18 jumlah varietas/galur unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	IKSK 3.1 Jumlah varietas/galur unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (galur/rumpun)

### 3.4. Kerangka Regulasi

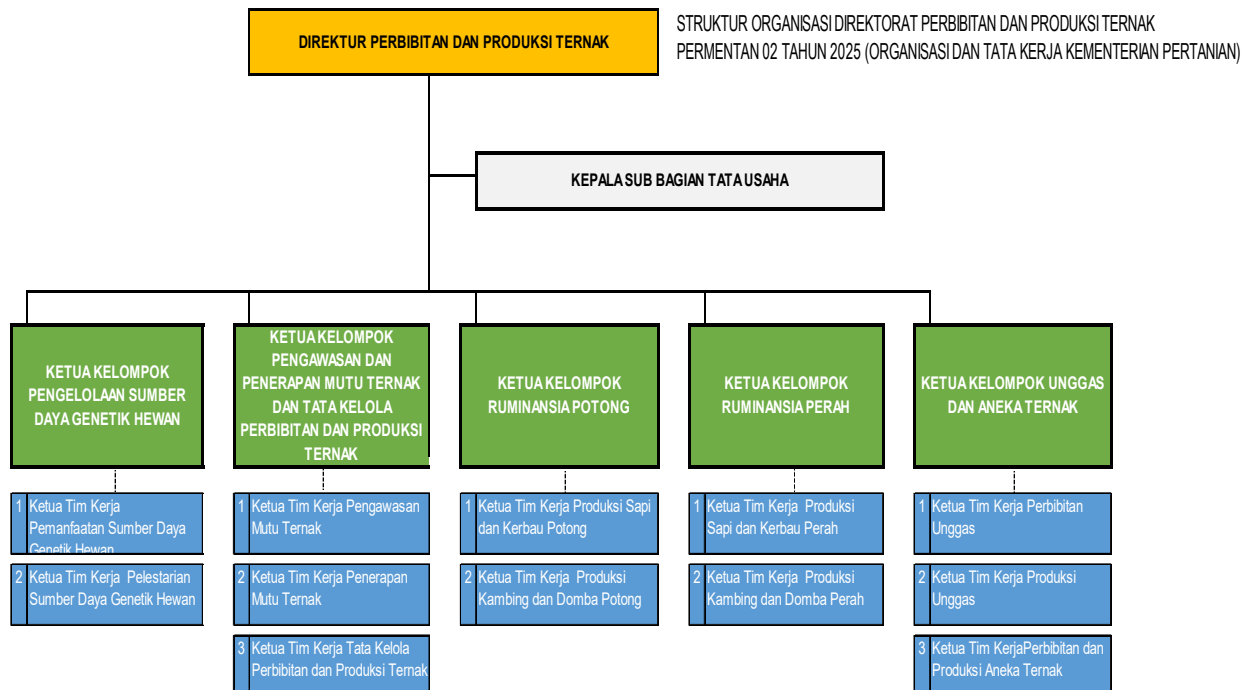
Kerangka regulasi dimaksudkan sebagai salah satu instrumen untuk dapat berjalannya kebijakan yang telah ditetapkan. Regulasi dibidang peternakan dan Kesehatan hewan khususnya dalam aspek perbibitan dan produksi ternak harus senantiasa dilakukan *review* sehingga regulasi yang ada akan mampu mendorong pelaksanaan kegiatan secara efektif efisien baik melalui penyempurnaan regulasi maupun pembuatan regulasi yang baru. Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Dit. Bitpro dituangkan dalam tabel matriks Kerangka Regulasi seperti pada tabel 16.

Tabel 16. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	R-PERMENTAN: Revisi Permentan Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyediaan dan peredaran semen beku ruminansia besar	Perluasan ruang lingkup dari semen beku khusus ruminansia besar menjadi semen beku dan embrio secara umum	Dit. Bitpro	BIB/D dan BET	2026
2	R-Permentan tentang Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pendelegasian PP No. 28 Tahun 2025	Ditjen PKH untuk subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	BKPM, Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, Biro Hukum Kementerian Pertanian	2027
3	R-Permentan tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik hewan	Pendelegasian PP No. 48 Tahun 2011	Dit. Bitpro	UPT perbibitan dan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan hidup, Kementerian Hukum	2028

### 3.5. Kerangka Kelembagaan

Organisasi Dit. Bitpro mengikuti prinsip struktur *follow the strategy* yang memerlukan kerangka kelembagaan untuk menyesuaikan perubahan kebijakan pengembangan perbibitan dan produksi ternak. Pada tahun 2025 terdapat perubahan struktur organisasi Dit. Bitpro yang mengacu pada peraturan menteri pertanian nomor 02 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pertanian, struktur organisasi Dit. Bitpro sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dit. Bitpro

Pelaksanaan kegiatan Dit. Bitpro dalam rangka pembibitan, produksi dan distribusi benih/bibit ternak dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis pusat maupun daerah. UPT perbibitan pusat berjumlah 10 UPT yang meliputi dua Balai Besar yaitu Balai Besar Inseminasi Buatan dan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak serta satu balai Inseminasi Buatan dan tujuh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak serta Balai Embrio Ternak. Pengembangan kelembagaan pembibitan ditingkat lapang seperti kelembagaan peternak, kelembagaan usaha dan asosiasi komoditas maupun produksi perlu didorong untuk mendukung peningkatan produksi dan produktifitas ternak.

Mekanisme kerja Dit. Bitpro adalah menyelenggarakan fungsi penyiapan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, dan prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengelolaan sumberdaya genetik hewan, pengawasan dan penerapan mutu ternak dan tata kelola perbibitan ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pada bidang perbibitan dan produksi ternak meliputi pembibitan dan pengembangbiakan yang akan menghasilkan bibit unggul, bakalan dan indukan.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah pencapaian yang diharapkan sebagai hasil akhir dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Target ini mencerminkan ukuran atas keberhasilan yang ingin dicapai organisasi, yang meliputi: Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Dengan menetapkan target kinerja yang jelas, organisasi dapat memantau perkembangan, mengukur keberhasilan, dan melakukan evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan/program yang dilaksanakan selaras dengan rencana strategis yang telah disusun.

Penentuan Sasaran Program (SP), Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ditjen PKH dilakukan dengan mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian dan mempertimbangan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta RPJMN dan RPJPN. Sasaran program Ditjen PKH (SP2) yaitu terpenuhinya produksi komoditas peternakan dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) produksi daging, telur dan susu diturunkan ke Dit. Bitpro sebagai sasaran kegiatan (Tabel 17).

Tabel 17. Target Sasaran Kinerja Dit. Bitpro

Sasaran Kegiatan	IKSK	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
SK.1 Terpenuhinya potensi produksi ternak untuk produksi daging, telur dan susu	IKSK 1.1 Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas daging (%)	94,92	95,12	95,32	95,53	95,76
	IKSK 1.2 Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas telur (%)	102,1	102,14	102,18	102,22	102,26
	IKSK 1.3 Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas susu (%)	21,03	25,17	29,03	33,69	39,08
SK.2 Tersedianya bibit/benih ternak bermutu berdasarkan kebutuhan produksi daging, telur dan susu	IKSK 2.1 Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi daging (%)	86,87	87,34	88,26	88,59	88,92
	IKSK 2.2 Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi telur (%)	102,1	102,14	102,18	102,22	102,26

Sasaran Kegiatan	IKSK	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	IKSK 2.3 Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi susu (%)	0,21	0,28	0,37	0,5	0,68
SK.3 Terlindunginya varietas unggul tanaman dan hewan	IKSK 3.1 Jumlah varietas/galur unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (galur/rumpun)	38	41	44	47	50

Sasaran program Ditjen PKH (SP2) yang diturunkan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbibitan dan produksi ternak sebagai berikut:

- SK.4 Tersedianya bibit/benih ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak/instansi pemerintah di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak.
- SK.5 Terjaminnya mutu bibit/benih ternak unggul yang beredar di wilayah kerja UPT Perbibitan dan Produksi Ternak.

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan salah satu komponen krusial dalam Renstra Dit. Bitpro tahun 2025-2029. Kerangka ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan terlaksana secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan ini mencakup sumber pendanaan APBN yang meliputi Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Hibah luar negeri.

Melalui kerangka pendanaan yang komprehensif, Dit. Bitpro berkomitmen untuk mencapai visi dan misinya dalam meningkatkan produksi dan produktifitas ternak di Indonesia selama periode 2025-2029. Target kinerja dan kerangka pendanaan Dit. Bitpro dapat dilihat pada tabel target kinerja dan kerangka pendanaan Dit. Bitpro 2025-2029 pada lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Dit. Bitpro tahun 2025-2029 disusun sebagai panduan strategis dalam mewujudkan visi "Perbibitan dan Produksi Ternak Maju, Berkelanjutan, dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia". Renstra ini telah dirancang dengan mengacu pada Kerangka pembangunan nasional, termasuk RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian Pertanian, dan Renstra Ditjen PKH serta Asta Cita sebagai landasan kebijakan pembangunan peternakan nasional.

Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang di subsektor peternakan dan kesehatan hewan, Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kontribusi Dit. Bitpro terhadap pembangunan peternakan nasional, khususnya dalam meningkatkan populasi dan produksi ternak guna mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Melalui implementasi Renstra ini, Dit. Bitpro berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan secara terukur, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Dit. Bitpro siap menghadapi dinamika global dan lokal, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan peternakan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Renstra ini dapat menjadi langkah strategis dalam mencapai kemajuan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan yang lebih baik di masa depan.

Lampiran 1. Indikator Kinerja, Sasaran Kegiatan 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	
01	Terpenuhinya potensi produksi ternak untuk produksi daging, telur dan susu	01	Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas daging	%	94,92	95,12	95,32	95,53	95,76
		02	Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas telur	%	102,1	102,14	102,18	102,22	102,26
		03	Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas susu	%	21,03	25,17	29,03	33,69	39,08
02	Tersedianya bibit/benih ternak bermutu berdasarkan kebutuhan produksi daging, telur dan susu	04	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi daging	%	86,87	87,34	88,26	88,59	88,92
		05	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi telur	%	102,1	102,14	102,18	102,22	102,26
		06	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi susu	%	0,21	0,28	0,37	0,5	0,68
03	Terlindunginya varietas unggul tanaman dan hewan	07	Jumlah varietas/galur unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	galur/rumpun	38	41	44	47	50
04	Tersedianya bibit/benih ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak/instansi pemerintah di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak	08	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTU HPT Indrapuri	%	77	80	82	84	85
		09	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTU HPT Siborong borong	%	70	75	78	82	85
		10	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTU HPT Padang Mangatas	%	72	74	76	78	80
		11	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTU HPT Sembawa	%	95	96	97	98	98
		12	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BBPTU HPT Baturraden	%	64	75	83	87	90
		13	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTU HPT Denpasar	%	90	91	92	93	95
		14	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTU HPT Pelaihari	%	70	73	75	78	80
		15	Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BIB Lembang	%	95	96	97	98	98
16	Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap	%	95	96	97	98	98		

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BBIB Singosari						
		17 Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BET Cipelang	%	90	91	93	94	95
		18 Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BET Cipelang	%	75	80	82	85	85
05	Terjaminnya mutu bibit/benih ternak unggul yang beredar di wilayah kerja UPT Perbibitan dan Produksi Ternak	19 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU HPT Indrapuri	%	77	80	82	84	85
		20 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU HPT Siborong borong	%	81	84	85	86	87
		21 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU HPT Padang mangatas	%	85	86	87	88	90
		22 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU HPT Sembawa	%	95	96	97	98	98
		23 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BBPTU HPT Baturraden	%	80	82	83	84	85
		24 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU HPT Denpasar	%	90	91	92	93	95
		25 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU HPT Pelaihari	%	75	80	85	88	88
		26 Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BIB Lembang	%	95	96	97	98	98
		27 Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BBIB Singosari	%	95	96	97	98	98
		28 Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BET Cipelang	%	90	92	93	94	95
		29 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BET Cipelang	%	80	80	80	85	85

Lampiran 2. Kegiatan dan Alokasi Anggaran Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Tahun 2025-2029

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1785 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak</b>								<b>394.854,997</b>	<b>128.322,251</b>	<b>2.451.152,9</b>	<b>2.455.462</b>	<b>2.529.546,51</b>
SK.1	Terpenuhinya potensi produksi ternak untuk produksi daging, telur dan susu							171.519,863	69.322,717	809.465	809.840,0	908.465
IKK 1.1	Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas daging	%	94,92	95,12	95,32	95,53	95,76	6.457,188	38.513,083	607.060,00	607.435,00	685.760,00
KRO	QAH. Pelayanan Publik Lainnya							-	14.261,866	407.250	407.625	474.750
RO	QAH.001. Layanan Optimalisasi Reproduksi	Layanan	0	499.761	2.475.000	2.475.000	2.700.000	-	14.261,866	371.250	371.625	432.000
RO	QAH.002. Layanan Penandaan dan Pendataan Ternak	Layanan	0	0	1.440.000	1.440.000	1.710.000	-	-	36.000	36.000	42.750
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-	-	3.150	3.150	3.150
RO	RAG.006. Sarana Penandaan dan Pendataan Ternak	Unit	0	0	90.000	90.000	90.000	-	-	3.150	3.150	3.150
KRO	AFA. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria		-					300	200	500	500	500
RO	AFA.001. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	NSPK	3	2	5	5	5	300	200	500	500	500
KRO	AEA. Koordinasi							1.850,00	2.619,617	14.650	14.650	14.650
RO	AEA.001. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak	Keg	6	4	5	5	5	1.850,00	2.619,617	3.250	3.250	3.250
RO	AEA. 002. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di Daerah	Keg	0	0	38	38	38	-	-	11.400	11.400	11.400
KRO	QDD. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat							-	-	4.260	4.260	4.260
RO	QDD.002. Fasilitasi dan pembinaan pada wilayah sumber bibit untuk kelompok peternak	Klpk masy	0	0	12	12	12	-	-	4.260	4.260	4.260
KRO	QEO. Bantuan Produk dan Peralatan		0	0				4.307,188	21.431,60	177.250	177.250	188.450
RO	QEO. 003. Ternak Ruminansia Potong	Ekor	1.000	5.200	15.000	15.500	16.000	3.060,040	20.800,00	130.000	130.000	138.500
RO	QEO. 005. Ternak Lainnya	Ekor	100	50	3.500	3.600	3.700	1.247,148	631,60	47.250	47.250	49.950
IKSK1.2	Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas telur	%	102,1	102,14	102,18	102,22	102,26	164.962,675	30.802,50	78.705,00	78.705,00	88.705,00

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KRO	AFA. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria							100,00	-	100,00	100,00	100,00
RO	AFA.001. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	NSPK	1	0	1	1	1	100,00	-	100,00	100,00	100,00
KRO	AEA. Koordinasi							-	-	8.250,00	8.250,00	8.250,00
RO	AEA.001. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak	Keg	0	0	1	1	1	-	-	650,00	650,00	650,00
RO	AEA. 002. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di Daerah	Keg	0	0	38	38	38	-	-	7.600,00	7.600,00	7.600,00
KRO	QDD. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat							-	-	355,00	355,00	355,00
RO	QDD.002. Fasilitasi dan pembinaan pada wilayah sumber bibit untuk kelompok peternak	Klpk Masy	0	0	1	1	1	-	-	355,00	355,00	355,00
KRO	QEO. Bantuan Produk dan Peralatan							164.862,675	30.802,50	70.000,00	70.000,00	80.000,00
RO	QEO.004. Ternak Unggas	Ekor	496.000	92.500	200.000	350.000	400.000	164.862,675	30.802,50	70.000,00	70.000,00	80.000,00
IKSK1.3	Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas susu	%	21,03	25,17	29,03	33,69	39,08	100,00	7,134	123.700,00	123.700,00	134.000,00
KRO	QAH. Pelayanan Publik Lainnya							-	7,134	31.500,00	31.500,00	34.750,00
RO	QAH.001. Layanan Optimalisasi Reproduksi	Layanan	-	250	275.000	275.000	300.000	-	7,134	27.500,00	27.500,00	30.000,00
RO	QAH.002. Layanan Penandaan dan Pendataan Ternak	Layanan	-	0	160.000	160.000	190.000	-	-	4.000,00	4.000,00	4.750,00
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-	-	350,00	350,00	350,00
RO	RAG.006. Sarana Penandaan dan Pendataan Ternak	Unit		0	10.000	10.000	10.000	-	-	350,00	350,00	350,00
KRO	AFA. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria							100,00	-	100,00	100,00	100,00
RO	AFA.001. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak	NSPK	1	0	1	1	1	100,00	-	100,00	100,00	100,00
KRO	AEA. Koordinasi							-	-	2.150,00	2.150,00	2.150,00
RO	AEA.001. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak	Keg	0	0	1	1	1	-	-	650,00	650,00	650,00
RO	AEA. 002. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di Daerah	Keg	0	0	10	10	10	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
KRO	QDD. Fasilitasi dan Pembinaan							-	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Kelompok Masyarakat											
RO	QDD.001. Fasilitas dan pembinaan penguatan uji zuriat sapi perah untuk kelompok peternak	Klpk Masy	0	0	25	25	25	-	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00
KRO	QEO. Bantuan Produk dan Peralatan							-	-	87.500,00	87.500,00	94.550,00
RO	QEO. 002. Ternak Ruminansia Perah	Ekor	0	0	2.500	3.000	4.000	-	-	87.500,00	87.500,00	94.550,00
SK.2	Tersedianya bibit/benih ternak bermutu berdasarkan kebutuhan produksi daging, telur dan susu							-	-	3.405,00	3.405,00	4.105,00
IKK 2.1	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi daging	%	86,87	87,34	88,26	88,59	88,92	-	-	2.400,00	2.400,00	3.100,00
KRO	PDC. Sertifikasi produk							-	-	2.100,00	2.100,00	2.800,00
RO	PDC.001. Sertifikasi benih/bibit ternak	Sertifikat	0	0	15	20	25	-	-	1.050,00	1.050,00	1.750,00
RO	PDC.002. Penilaian penerapan Good Breeding Practices/Good Farming Practices/Good Hatchery Practices	Sertifikat	0	0	6	6	6	-	-	1.050,00	1.050,00	1.050,00
KRO	QIA. Pengawasan dan Pengendalian Produk							-	-	300,00	300,00	300,00
RO	QIA.001. Pengawasan dan penerapan mutu bibit ternak dan tata kelola perbibitan dan produksi ternak	Laporan	0	0	1	1	1	-	-	300,00	300,00	300,00
IKK2.2	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi telur	%	102,1	102,14	102,18	102,22	102,26	-	-	620,00	620,00	620,00
KRO	PDC. Sertifikasi produk							-	-	470,00	470,00	470,00
RO	PDC.001. Sertifikasi benih/bibit ternak	Sertifikat	0	0	10	10	10	-	-	350,00	350,00	350,00
RO	PDC.002. Penilaian penerapan Good Breeding Practices/Good Farming Practices/Good Hatchery Practices	Sertifikat	0	0	6	6	6	-	-	120,00	120,00	120,00
KRO	QIA. Pengawasan dan Pengendalian Produk							-	-	150,00	150,00	150,00

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	QIA.001. Pengawasan dan penerapan mutu bibit ternak dan tata kelola perbibitan dan produksi ternak	Laporan	0	0	1	1	1	-	-	150,00	150,00	150,00
IKK2.3	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi susu	%	0,21	0,28	0,37	0,5	0,68	-	-	385,00	385,00	385,00
KRO	PDC. Sertifikasi produk							-	-	235,00	235,00	235,00
RO	PDC.001. Sertifikasi benih/bibit ternak	Sertifikat	0	0	5	5	5	-	-	175,00	175,00	175,00
RO	PDC.002. Penilaian penerapan Good Breeding Practices/Good Farming Practices/Good Hatchery Practices	Sertifikat	0	0	3	3	3	-	-	60,00	60,00	60,00
KRO	QIA. Pengawasan dan Pengendalian Produk							-	-	150,00	150,00	150,00
RO	QIA.001. Pengawasan dan penerapan mutu bibit ternak dan tata kelola perbibitan dan produksi ternak	Laporan	0	0	1	1	1	-	-	150,00	150,00	150,00
SK.3	Terlindunginya varietas unggul tanaman dan hewan							-	-	900,00	900,00	900,00
IKK3	Jumlah varietas/galur unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	Galur	38	41	44	47	50	-	-	900,00	900,00	900,00
KRO	REB. Konservasi Jenis / Spesies	<b>Galur</b>						-	-	900,00	900,00	900,00
RO	REB. 001. Pengelolaan SDGH		0	0	3	3	3	-	-	600,00	600,00	600,00
RO	REB. 002. Rumpun/Galur yang dilepas	Jenis	0	0	2	2	2	-	-	300,00	300,00	300,00
SK.4	Tersedianya bibit/benih ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak/instansi pemerintah di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak							147.921,703	-	1.259.391,6	1.241.439,35	1.194.257,61
IKK 4.1	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTU-HPT Indrapuri	%	77	80	82	84	85	1.693,817	-	38.840,70	100.550,40	114.650,00
KRO	RAG, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							1.693,817	-	14.650,00	70.550,40	84.650,00
RO	RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	5.465	0	1	1	1	1.693,817	-	14.650,00	70.550,40	84.650,00
RO	RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit							-			

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KRO	RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-	-	24.190,70	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	3	0	1	1	1	-	-	24.190,70	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit							-			
IKK 4.2	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Siborongborong	%	70	75	78	82	85	3.940,458	-	39.650,00	149.650,00	149.650,00
KRO	RAG, Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							3.940,458	-	14.650,00	119.650,00	119.650,00
RO	RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	1	0	1	1	1	3.940,458	-	14.650,00	119.650,00	119.650,00
RO	RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit							-			
KRO	RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-	-	25.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	1	0	1	1	1	-	-	25.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit						-	-			
IKK 4.3	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Padang Mangatas	%	72	74	76	78	80	1.425,42	-	39.650,00	109.650,00	109.650,00
KRO	RAG, Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							1.425,42	-	14.650,00	79.650,00	79.650,00
RO	RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	3008	0	1	1	1	1.425,421	-	14.650,00	79.650,00	79.650,00
RO	RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit							-			
KRO	RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-	-	25.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	3	0	1	1	1	-	-	25.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit							-			
IKK 4.4	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Sembawa	%	95	96	97	98	98	3.478,276	-	214.650,00	162.150,00	158.150,00
KRO	RAG, Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							3.478,276	-	54.650,00	132.150,00	128.150,00
RO	RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	2506	0	1	1	1	3.478,276	-	4.650,00	132.150,00	28.150,00

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO	RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit								50.000,00		
KRO	RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-	-	160.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	4	0	1	1	1	-	-	20.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit								140.000,00		
IKK 4.5	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BBPTUHPT Baturaden	%	64	75	83	87	90	4.249,756	-	84.650,00	174.662,00	175.745,15
KRO	RAG, Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							4.249,756	-	64.650,00	144.662,00	145.745,15
RO	RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	5.763	0	1	1	1	4.249,756	-	64.650,00	144.662,00	145.745,15
RO	RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit										
KRO	RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-	-	20.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	4	0	1	1	1	-	-	20.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit										
IKK 4.6	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Denpasar	%	90	91	92	93	95	2.959,039	-	174.650,00	104.650,00	104.650,00
KRO	RAG, Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							2.959,039	-	54.650,00	74.650,00	74.650,00
RO	RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	2.002	0	1	1	1	2.959,039	-	4.650,00	74.650,00	74.650,00
RO	RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit							-	50.000,00		
KRO	RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-	-	120.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	1	0	1	1	1	-	-	20.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit							-	100.000,00		
IKK 4.7	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Pelaihari	%	70	73	75	78	80	1.165,522	-	174.650,00	157.150,00	157.149,51
KRO	RAG, Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							1.165,522	-	54.650,00	127.150,00	127.149,51
RO	RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	2.003	0	1	1	1	1.165,522	-	4.650,00	127.150,00	127.149,51
RO	RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit			1				-	50.000,00		

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KRO	RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-	-	120.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak		3	0	1	1	1	-	-	120.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit			1					100.000,00		
IKK 4.8	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BIB Lembang	%	95	96	97	98	98	3.806,702	-	289.650,00	92.650,00	85.921,95
KRO	RAG, Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							3.806,702	-	79.650,00	62.650,00	55.921,95
RO	RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	3.509	0	1	1	1	3.806,702	-	4.650,00	62.650,00	55.921,95
RO	RAG.007. SBSN Sarana UPT									75.000,00		
KRO	RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-	-	210.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	2	0	1	1	1	-	-	20.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.006. SBSN Prasarana UPT				1					190.000,00		
IKK 4.9	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BBIB Singosari	%	95	96	97	98	98	120.576,171	-	29.650,00	94.900,00	59.041,00
KRO	RAG, Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							23.271,071	-	9.650,00	64.900,00	29.041,00
RO	RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	5.738	0	1	1	1	1.262,871	-	9.650,00	64.900,00	29.041,00
RO	RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit	1.155	0				22.008,20	-			
KRO	RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							97.305,10	-	20.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	2	0	1	1	1	11.971,10	-	20.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit	1	0	0	0	0	85.334,00				
IKK 4.10	Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BET Cipelang	%	90	91	93	94	95	4.626,541	-	163.350,90	55.426,95	39.650,00
KRO	RAG, Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							4.626,541	-	54.650,00	25.426,95	9.650,00
RO	RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	1	0	1	1	1	4.626,541	-	4.650,00	25.426,95	9.650,00
RO	RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit								50.000,00		
KRO	RBK. Prasarana Bidang Pertanian.							-	-	108.700,90	30.000,00	30.000,00

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Kehutanan dan Lingkungan Hidup											
RO	RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	1	0	1	1	1	-	-	20.000,00	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit								88.700,90		
IKK 4.11	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BET Cipelang	%	75	80	82	85	85	-	-	10.000,00	40.000,00	40.000,00
KRO	RAG, Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RO	RAG.001. Sarana Perbibitan Ternak	Unit	3.912	0	1	1	1	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RO	RAG.007. SBSN Sarana UPT	Unit										
KRO	RBK. Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup							-	-	-	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.001. Prasarana Perbibitan Ternak	Unit	2	0	1	1	1	-	-	-	30.000,00	30.000,00
RO	RBK.006. SBSN Prasarana UPT	Unit										
SK.5	Terjaminnya mutu bibit/benih ternak unggul yang beredar di wilayah kerja UPT Perbibitan dan Produksi Ternak							75.413,431	58.999,53	377.991,30	399.877,65	421.818,90
IKK 5.1	Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Indrapuri	%	77	80	82	84	85	1.358,686	728,00	4.170,00	4.672,50	5.242,50
KRO	PDA. Standardisasi Produk							1.358,686	728,00	3.645,00	4.147,50	4.717,50
RO	PDA. 002. Bibit Ternak Unggul	Ekor	369	112	486	553	629	1.358,686	728,00	3.645,00	4.147,50	4.717,50
KRO	PDC, Sertifikasi produk							-	-	175,00	175,00	175,00
RO	PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	ekor	0	0	486	553	629		-	175,00	175,00	175,00
KRO	AEA. Koordinasi							-	-	350,00	350,00	350,00
RO	AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Keg	0	0	1	1	1	-	-	350,00	350,00	350,00
IKK 5.2	Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Siborongborong	%	81	84	85	86	87	1.021,35	673,53	7.466,00	9.338,00	11.222,00
KRO	PDA. Standardisasi Produk							1.021,35	673,53	6.906,00	8.778,00	10.662,00
RO	PDA. 002. Bibit Ternak Unggul	Ekor	361	195	1.151	1.463	1.777	1.021,35	673,53	6.906,00	8.778,00	10.662,00
KRO	PDC, Sertifikasi produk							-	-	210,00	210,00	210,00
RO	PDC.003. Sertifikasi benih/bibit	ekor		0	1.151	1.463	1.777		-	210,00	210,00	210,00

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	ternak UPT											
KRO	AEA. Koordinasi							-	-	350,00	350,00	350,00
RO	AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Keg								350,00	350,00	350,00
IKK 5.3	Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Padang Mangatas	%	85	86	87	88	90	2.332,232	1.786,15	2.775,00	2.925,00	3.075,00
KRO	PDA. Standardisasi Produk							2.332,232	1.786,15	2.250,00	2.400,00	2.550,00
RO	PDA. 002. Bibit Ternak Unggul	Ekor	490	252	300	320	340	2.332,232	1.786,15	2.250,00	2.400,00	2.550,00
KRO	PDC, Sertifikasi produk							-	-	175,00	175,00	175,00
RO	PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	ekor		0	300	320	340		-	175,00	175,00	175,00
KRO	AEA. Koordinasi							-	-	350,00	350,00	350,00
RO	AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Keg								350,00	350,00	350,00
IKK 5.4	Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Sembawa	%	95	96	97	98	98	7.484,819	2.045,00	144.521,50	155.577,70	166.658,20
KRO	PDA. Standardisasi Produk							7.484,819	2.045,00	143.926,50	154.982,70	166.063,20
RO	PDA. 002. Bibit Ternak Unggul	Ekor	749.136	171.050	959.510	1.033.218	1.107.088	7.484,819	2.045,00	143.926,50	154.982,70	166.063,20
KRO	PDC, Sertifikasi produk							-	-	245,00	245,00	245,00
RO	PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	ekor		0	959,51	1,033,218	1,107,088		-	245,00	245,00	245,00
KRO	AEA. Koordinasi							-	-	350,00	350,00	350,00
RO	AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Keg								350,00	350,00	350,00
IKK 5.5	Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BBPTU-HPT Baturaden	%	80	82	83	84	85	10.007,291	6.170,00	10.945,00	11.515,00	11.885,00
KRO	PDA. Standardisasi Produk							10.007,291	6.170,00	10.350,00	10.920,00	11.290,00
RO	PDA. 002. Bibit Ternak Unggul	Ekor	867	950	1.035	1.092	1.129	10.007,291	6.170,00	10.350,00	10.920,00	11.290,00
KRO	PDC, Sertifikasi produk							-	-	245,00	245,00	245,00
RO	PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	ekor		0	1.035	1.092	1.129		-	245,00	245,00	245,00
KRO	AEA. Koordinasi							-	-	350,00	350,00	350,00
RO	AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Keg								350,00	350,00	350,00

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 5.6	Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Denpasar	%	90	91	92	93	95	1.811,352	893,251	2.010,00	2.092,50	2.175,00
KRO	PDA. Standardisasi Produk							1.811,352	893,251	1.485,00	1.567,50	1.650,00
RO	PDA. 002. Bibit Ternak Unggul	Ekor	350	137	198	209	220	1.811,352	893,251	1.485,00	1.567,50	1.650,00
KRO	PDC, Sertifikasi produk							-	-	175,00	175,00	175,00
RO	PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	ekor		0	198	209	220			175,00	175,00	175,00
KRO	AEA. Koordinasi							-	-	350,00	350,00	350,00
RO	AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Keg								350,00	350,00	350,00
IKK 5.7	Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Pelaihari	%	75	80	85	88	88	5.056,985	5.210,00	139.253,80	146.189,95	153.473,20
KRO	PDA. Standardisasi Produk							5.056,985	5.210,00	138.658,80	145.594,95	152.878,20
RO	PDA. 002. Bibit Ternak Unggul	Ekor	1.038.551	410.520	924.392	970.633	1.019.188	5.056,985	5.210,00	138.658,80	145.594,95	152.878,20
KRO	PDC, Sertifikasi produk							-	-	245,00	245,00	245,00
RO	PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	ekor		0	924,392	970,633	1,019,188		-	245,00	245,00	245,00
KRO	AEA. Koordinasi							-	-	350,00	350,00	350,00
RO	AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Keg								350,00	350,00	350,00
IKK 5.8	Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BIB Lembang	%	95	96	97	98	98	19.626,163	18.726,487	22.225,00	22.325,00	22.425,00
KRO	PDA. Standardisasi Produk							19.626,163	18.726,487	21.700,00	21.800,00	21.900,00
RO	PDA. 001. Benih Ternak Unggul	Dosis	2.900.000	2.260.000	2.170.000	2.180.000	2.190.000	19.626,163	18.726,487	21.700,00	21.800,00	21.900,00
KRO	PDC, Sertifikasi produk							-	-	175,00	175,00	175,00
RO	PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	ekor	0	0	600	600	600	-	-	175,00	175,00	175,00
KRO	AEA. Koordinasi							-	-	350,00	350,00	350,00
RO	AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Keg								350,00	350,00	350,00
IKK 5.9	Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BBIB Singosari	%	95	96	97	98	98	21.083,977	21.594,229	36.275,00	36.780,00	37.025,00
KRO	PDA. Standardisasi Produk							21.083,977	21.594,229	35.750,00	36.255,00	36.500,00
RO	PDA. 001. Benih Ternak Unggul	Dosis	3.500.000	2.580.000	3.575.000	3.625.500	3.650.000	21.083,977	21.594,229	35.750,00	36.255,00	36.500,00

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	TARGET					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KRO	PDC, Sertifikasi produk							-	-	175,00	175,00	175,00
RO	PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	ekor	0	0	1296	1312	1328			175,00	175,00	175,00
KRO	AEA. Koordinasi							-	-	350,00	350,00	350,00
RO	AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Keg								350,00	350,00	350,00
IKK 5.10	Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BET Cipelang	%	90	92	93	94	95	5.358,344	947,387	7.725,00	7.837,00	8.013,00
KRO	PDA. Standardisasi Produk							5.358,344	947,387	7.200,00	7.312,00	7.488,00
RO	PDA. 001. Benih Ternak Unggul	Embrio	800	75	900	914	936	5.358,344	947,387	7.200,00	7.312,00	7.488,00
KRO	PDC, Sertifikasi produk							-	-	175,00	175,00	175,00
RO	PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	ekor	0	0	40	40	40			175,00	175,00	175,00
KRO	AEA. Koordinasi							-	-	350,00	350,00	350,00
RO	AEA.003. Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT	Keg								350,00	350,00	350,00
IKK 5.11	- Persentase ketersediaan bibit ternak unggul bermutu terhadap total ternak yang beredar di wilayah kerja BET Cipelang	%	80	80	80	85	85	272,232	225,50	625,00	625,00	625,00
KRO	PDA. Standardisasi Produk							272,232	225,50	450,00	450,00	450,00
RO	PDA. 002. Bibit Ternak Unggul	Ekor	60	60	60	60	60	272,232	225,50	450,00	450,00	450,00
KRO	PDC, Sertifikasi produk							-	-	175,00	175,00	175,00
RO	PDC.003. Sertifikasi benih/bibit ternak UPT	ekor	0	0	60	60	60			175,00	175,00	175,00

Lampiran 3. Manajemen Resiko

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Pernyataan Resiko	Penyebab Resiko	Sumber Resiko	Kategori Resiko	Uraian Dampak	Perlakuan Resiko	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya potensi produksi ternak untuk komoditas peternakan prioritas	SK1	Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas peternakan prioritas (Daging, Susu, Telur)	Tidak tercapainya target persentase pemenuhan potensi produksi ternak prioritas sesuai target tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan Populasi Ternak: Penurunan jumlah populasi sapi/kerbau, kambing/domba, dan ayam akibat wabah penyakit, bencana alam, atau faktor lainnya.</li> <li>Penurunan Produktivitas: Menurunnya produktivitas ternak seperti meat yield, produksi susu per ekor, atau produktivitas harian ayam bertelur yang tidak sesuai dengan parameter teknis.</li> <li>Peningkatan Kebutuhan Nasional: Lonjakan kebutuhan daging, susu, dan telur nasional yang melampaui</li> </ul>	<p>Berdasarkan Manual Indikator Penetapan Target, sumber risiko dari "Tidak tercapainya target persentase pemenuhan potensi produksi ternak prioritas" dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu eksternal dan internal.</p> <p>Sumber Risiko Eksternal Sumber risiko ini berasal dari pihak di luar kendali langsung Direktorat, antara lain: Pelaku Usaha dan Peternak: Realisasi produksi di lapangan, terutama dari pelaku usaha perunggasan, yang menjadi dasar perhitungan produksi daging dan telur ayam ras. Fluktuasi pada tingkat peternak seperti wabah penyakit atau ketersediaan pakan dapat mempengaruhi populasi dan produktivitas ternak.</p> <p>Dinas Provinsi: Keakuratan dan validitas data populasi ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, sapi perah) yang diperoleh dari verifikasi dan validasi bersama dengan Dinas Provinsi pada tahun berjalan.</p> <p>Faktor Sosial-Ekonomi: Perubahan pada tingkat konsumsi per kapita dan jumlah penduduk yang menjadi dasar perhitungan</p>	<p>Risiko Kebijakan Risiko ini tergolong strategis karena kegagalan pencapaiannya berdampak langsung pada Sasaran Program (SP1), yaitu "Terpenuhinya kebutuhan pangan asal ternak dari produksi strategi nasional dalam penyediaan pangan, sehingga kegagalannya menandakan tidak efektifnya strategi yang dijalankan.</p> <p>Risiko Operasional Risiko ini juga merupakan risiko operasional karena pencapaian target sangat bergantung pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kegagalan dalam operasional, seperti penurunan populasi ternak akibat penyakit,</p>	<p>Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Uraian dampak dari tidak tercapainya target persentase pemenuhan potensi produksi ternak prioritas adalah kegagalan mencapai sasaran utama program, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan asal ternak dari produksi menimbulkan efek berantai yang signifikan, antara lain: Kesenjangan Pasokan dan Kebutuhan: Akan terjadi defisit atau kesenjangan antara kemampuan produksi dalam negeri dengan total kebutuhan nasional untuk komoditas pangan strategis seperti daging, susu, dan telur.</p> <p>Peningkatan Ketergantungan Impor: Untuk menutupi kekurangan pasokan domestik, pemerintah kemungkinan besar harus bergantung pada impor. Hal ini dapat melemahkan ketahanan pangan nasional dan membuat pasokan rentan terhadap gejolak pasar global.</p> <p>Potensi Ketidakstabilan</p>	<p>1. Fasilitasi pembinaan kelompok masyarakat</p> <p>2. Bantuan produk dan peralatan di bidang perbibitan dan produksi ternak</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan seluruh pelaku usaha perunggasan ayam ras pedaging (GPS, PS dan FS) dalam rangka supervisi, monitoring dan evaluasi populasi dan produksi untuk menjaga ketersediaan sesuai kebutuhan.</p>	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Pernyataan Resiko	Penyebab Resiko	Sumber Resiko	Kategori Resiko	Uraian Dampak	Perlakuan Resiko	Penanggung Jawab
					<p>kemampuan peningkatan produksi dalam negeri, misalnya karena pertumbuhan jumlah penduduk.</p>	<p>"Kebutuhan" nasional untuk setiap komoditas. Jika kebutuhan meningkat lebih cepat dari kemampuan produksi, target akan sulit tercapai.</p> <p>Sumber Risiko Internal Sumber risiko ini berasal dari dalam lingkup kerja Direktorat, yaitu: Pengolahan Data Statistik: Keakuratan dalam pengolahan data statistik dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) yang menjadi sumber data utama untuk indikator ini.</p> <p>Efektivitas Intervensi: Keberhasilan atau kegagalan program intervensi yang dirancang untuk meningkatkan produksi, seperti target rataan kenaikan produksi sapi/kerbau sebesar 1,78% atau kenaikan produktivitas susu 0,9% per tahun</p>	<p>tidak tercapainya produktivitas (contoh: meatyield), atau ketidakakuratan pengumpulan data produksi, akan secara langsung menyebabkan target tahunan tidak tercapai.</p>	<p>Harga: Ketergantungan pada impor dan kurangnya pasokan domestik dapat memicu volatilitas atau kenaikan harga di tingkat konsumen, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat.</p> <p>Beban keuangan negara, penurunan reputasi, K3, realisasi capaian kinerja sasaran strategis, temuan hasil BPK dan Inspektorat</p>		
2	Tersedianya bibit dan benih ternak bermutu berdasarkan kebutuhan produksi peternakan	<b>SK2</b>	Persentase ketersediaan bibit dan benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi peternakan	Tidak tercapainya target persentase ketersediaan bibit dan benih ternak bermutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gangguan pada Sumber Kontribusi: Realisasi dari berbagai sumber penyediaan bibit/benih tidak mencapai target. Ini termasuk kontribusi dari distribusi semen beku, produksi</li> </ul>	<p>Sumber Risiko Eksternal Sumber risiko ini berasal dari pihak di luar UPT dan Direktorat yang kontribusinya sangat vital untuk perhitungan target.</p> <p>Sektor Swasta dan Importir: Kontribusi dari bibit ayam ras (broiler dan layer) yang berasal dari pelaku usaha swasta. Selain itu, realisasi dari rekomendasi impor bibit</p>	<p>Risiko Operasional Risiko ini tergolong operasional karena secara langsung berkaitan dengan kegagalan dalam proses, sistem, dan pelaksanaan kegiatan teknis sehari-hari yang bertujuan untuk menyediakan bibit dan benih.</p>	<p>Uraian dampak dari tidak tercapainya target persentase ketersediaan bibit dan benih ternak bermutu adalah terhambatnya penyediaan bibit dan benih ternak dalam upaya peningkatan populasi dan produktivitas ternak nasional.</p> <p>Rincian Dampak Kegagalan ini menciptakan efek domino</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sertifikasi bibit bibit ternak</li> <li>Sertifikasi GBP/GFP</li> <li>Pengawasan, penerapan dan tata kelola perbibitan dan produksi ternak</li> <li>Memastikan adanya pelaporan kegiatan Inseminasi Buatan (IB),</li> </ol>	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Pernyataan Resiko	Penyebab Resiko	Sumber Resiko	Kategori Resiko	Uraian Dampak	Perlakuan Resiko	Penanggung Jawab
					<p>DOC/DOD oleh UPT, bibit ayam ras dari swasta, distribusi bibit kambing UPT, hingga realisasi impor bibit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas Program Rendah: Menurunnya efektivitas program-program pendukung seperti Inseminasi Buatan (IB) yang mempengaruhi tingkat kebuntingan dan kelahiran ternak.</li> <li>Keterbatasan Produksi Internal: Keterbatasan kapasitas produksi bibit/benih di UPT atau unit pembibitan lainnya. • Hambatan Eksternal: Adanya kendala dalam proses impor bibit atau penurunan produksi di</li> </ul>	<p>sapi perah dan kambing/domba potong juga menjadi faktor penentu.</p> <p>Peternak dan Masyarakat: Keberhasilan program Inseminasi Buatan (IB) di tingkat peternak sangat mempengaruhi kontribusi dari semen beku nasional. Parameter seperti potensi kebuntingan (65%) dan kelahiran (90%) bergantung pada kondisi di lapangan.</p> <p>Sumber Risiko Internal Sumber risiko ini berasal dari unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Direktorat yang secara langsung memproduksi bibit/benih.</p> <p>Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementan: Kinerja produksi dan distribusi dari UPT menjadi sumber risiko utama. Ini mencakup kontribusi unggas (DOC dan DOD) dari 2 UPT, kontribusi kambing dari 1 UPT, serta kontribusi susu dari sapi dan kambing perah yang juga berasal dari 1 UPT. Jika UPT gagal mencapai target produksi dan distribusinya, capaian indikator akan terganggu.</p>	<p>Pencapaian target ini bergantung pada keberhasilan berbagai program operasional yang menjadi sumber kontribusi, seperti:</p> <p>Distribusi semen beku nasional dan keberhasilan program Inseminasi Buatan (IB) di lapangan.</p> <p>Produksi dan distribusi DOC (Day Old Chick) dan DOD (Day Old Duck) dari Unit Pelaksana Teknis (UPT).</p> <p>Kontribusi dari sektor pembibitan ayam ras swasta.</p> <p>Proses dan realisasi rekomendasi impor bibit ternak.</p> <p>Kegagalan pada salah satu atau lebih dari kegiatan operasional tersebut akan secara langsung menyebabkan tidak tercapainya target ketersediaan bibit dan benih bermutu.</p>	<p>yang merugikan sektor peternakan secara keseluruhan:</p> <p>Menghambat Pencapaian Target Produksi: Tanpa ketersediaan bibit/benih unggul yang cukup, program-program untuk meningkatkan produksi daging, susu, dan telur akan terganggu. Hal ini secara langsung menyulitkan pencapaian sasaran utama untuk memenuhi kebutuhan pangan asal ternak dari produksi dalam negeri.</p> <p>Menurunkan Efisiensi Usaha Peternak: Peternak yang tidak mendapatkan akses terhadap bibit/benih bermutu akan mengalami penurunan produktivitas dan efisiensi usaha, yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan dan daya saing mereka.</p> <p>Memperlambat Perbaikan Mutu Genetik: Dalam jangka panjang, kekurangan pasokan bibit/benih unggul akan memperlambat program perbaikan mutu genetik ternak secara nasional, membuat Indonesia semakin tertinggal dalam inovasi perbibitan.</p>	<p>Pemeriksaan Kebuntingan (PKb), dan pelaporan kelahiran.</p>	

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Pernyataan Resiko	Penyebab Resiko	Sumber Resiko	Kategori Resiko	Uraian Dampak	Perlakuan Resiko	Penanggung Jawab
					<p>tingkat pembibit swasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan bibit dan benih untuk produksi peternakan nasional tidak terpenuhi. Hal ini secara langsung menghambat upaya peningkatan populasi dan produktivitas ternak, sehingga berpotensi mengganggu pencapaian sasaran strategis untuk memenuhi kebutuhan produksi ternak</li> </ul>					
3	Terlindungnya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	<b>SK3</b>	Persentase ketersediaan SDG Hewan tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya	Tidak tercapainya target jumlah penetapan/pelepasan rumpun/galur (R/G) hewan baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya Pengajuan: Jumlah pengajuan rumpun/galur hewan baru dari masyarakat atau lembaga terkait untuk ditetapkan/dilepas kan tidak mencapai target yang diharapkan.</li> <li>• Keterbatasan Anggaran: Tidak</li> </ul>	<p>Sumber Risiko Eksternal Sumber risiko ini berasal dari pihak di luar Direktorat yang menjadi inisiator atau pengusul rumpun/galur.</p> <p>Pengusul Rumpun/Galur: Jumlah pengajuan untuk penetapan/pelepasan rumpun atau galur hewan yang diajukan kepada Biro Hukum. Target indikator ini ditetapkan berdasarkan jumlah pengajuan tersebut. Jika jumlah usulan yang masuk sedikit, maka target</p>	<p>Kategori risiko untuk tidak tercapainya target jumlah penetapan/pelepasan rumpun/galur (R/G) hewan baru adalah Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan.</p> <p>## Risiko Operasional Risiko ini tergolong operasional karena kegagalan pencapaian target</p>	<p>Uraian dampak dari tidak tercapainya target jumlah penetapan/pelepasan rumpun/galur (R/G) hewan baru adalah</p> <p>terhambatnya upaya perlindungan dan pengakuan resmi terhadap Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan nasional.</p> <p>Rincian Dampak Kegagalan ini memiliki dampak serius terhadap pelestarian dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya perlindungan dan penambahan keragaman Sumber Daya Genetik (SDG) hewan nasional terhambat.</li> <li>2. Memberikan dukungan anggaran untuk melaksanakan uji observasi dan rapat tim penilai</li> </ol>	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Pernyataan Resiko	Penyebab Resiko	Sumber Resiko	Kategori Resiko	Uraian Dampak	Perlakuan Resiko	Penanggung Jawab
					tersedianya atau kurangnya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan penting seperti uji observasi dan rapat tim penilai, yang merupakan bagian dari proses penetapan.	akan sulit tercapai. Pengusul ini bisa berasal dari lembaga penelitian, universitas, kelompok peternak, atau pemerintah daerah.  Sumber Risiko Internal Sumber risiko ini berasal dari dalam proses atau institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas penetapan.	bersumber dari proses internal yang tidak berjalan efektif. Secara spesifik, risiko ini timbul dari kegagalan dalam operasional penganggaran dan fasilitasi, seperti tidak tersedianya "dukungan anggaran untuk melaksanakan uji observasi dan rapat tim penilai".  ## Risiko Kepatuhan Risiko ini juga merupakan risiko kepatuhan (compliance) karena proses penetapan dan pelepasan rumpun/galur adalah sebuah prosedur formal yang harus mengikuti aturan yang berlaku. Proses ini melibatkan "tim penilai" dan pengajuan kepada "Biro Hukum". Kegagalan untuk memenuhi target berarti ada hambatan dalam menjalankan prosedur formal ini,	pemanfaatan kekayaan genetik ternak Indonesia:  Potensi Hilangnya Keragaman Genetik: Rumpun atau galur hewan lokal yang belum ditetapkan tidak memiliki status perlindungan hukum. Hal ini meningkatkan risiko kepunahan akibat persilangan yang tidak terkontrol atau tidak adanya program konservasi, sehingga Indonesia berpotensi kehilangan kekayaan genetik yang unik dan berharga.  Tidak Adanya Dasar untuk Pengembangan: Tanpa penetapan resmi, suatu rumpun/galur tidak dapat dikembangkan secara sistematis melalui program pemuliaan nasional. Akibatnya, potensi ekonomi dan keunggulannya (misalnya, adaptasi terhadap lingkungan lokal atau resistensi penyakit) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.  Perlambatan Laju Inventarisasi Kekayaan Ternak: Target tahunan berfungsi sebagai pendorong untuk terus mengidentifikasi dan		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hambatan Proses: Adanya kendala dalam proses administrasi atau teknis selama tahap penilaian hingga pengajuan penetapan.</li> <li>• Terhambatnya upaya perlindungan dan pengakuan resmi terhadap Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan nasional. Kegagalan mencapai target ini dapat memperlambat laju penambahan keragaman genetik ternak yang diakui secara nasional</li> </ul>	<p>Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak: Ketersediaan dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan krusial seperti uji observasi dan rapat tim penilai. Tanpa anggaran yang memadai, proses penilaian dan penetapan tidak dapat berjalan.</p> <p>Biro Hukum: Proses penetapan/pelepasan melibatkan pengajuan kepada Biro Hukum. Adanya kendala atau lamanya proses di tingkat birokrasi ini dapat menjadi sumber risiko yang menghambat pencapaian target.</p>				

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Pernyataan Resiko	Penyebab Resiko	Sumber Resiko	Kategori Resiko	Uraian Dampak	Perlakuan Resiko	Penanggung Jawab
					dan berpotensi menyebabkan hilangnya rumpun/galur lokal yang berharga.		sehingga dapat dianggap sebagai risiko ketidakpatuhan terhadap alur dan target yang telah ditetapkan	mendaftarkan kekayaan genetik ternak. Kegagalan mencapai target ini menunjukkan adanya perlambatan dalam upaya inventarisasi dan pengakuan SDG Hewan secara nasional.		
4	Tersedianya bibit/benih ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak	<b>SK4</b>	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak	Tidak tercapainya target persentase pemenuhan permintaan bibit/benih ternak di UPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas Produksi Terbatas: Jumlah produksi bibit atau benih ternak di UPT lebih rendah dibandingkan total permintaan yang masuk dari peternak.</li> <li>• Keterbatasan Sumber Daya: Adanya keterbatasan sumber daya di UPT (seperti jumlah induk, pakan, atau sarana prasarana) yang menghambat upaya untuk meningkatkan produksi bibit/benih.</li> <li>• Kebutuhan Peternak Tidak Terpenuhi: Permintaan peternak akan bibit/benih ternak unggul</li> </ul>	<p>Berdasarkan manual indikator, risiko ini muncul karena adanya kesenjangan antara kemampuan produksi UPT dengan jumlah permintaan yang masuk. Berikut adalah rincian sumber risikonya:</p> <p>Kapasitas Produksi UPT: Sumber risiko utama adalah kapasitas produksi bibit/benih di dalam UPT. Jika kapasitas produksi lebih rendah dari total permintaan yang diajukan oleh peternak, UPTD, atau UPT lain, maka target tidak akan tercapai. Hal ini ditegaskan oleh strategi intervensi yang ditetapkan, yaitu "Meningkatkan produksi bibit atau benih ternak di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak".</p> <p>Manajemen Sumber Daya Internal: Kemampuan UPT dalam mengelola sumber daya internalnya—seperti jumlah induk produktif, manajemen pakan, kesehatan ternak, dan sarana prasarana—secara langsung</p>	<p>Kategori risiko untuk tidak tercapainya target persentase pemenuhan permintaan bibit/benih ternak di UPT adalah Risiko Operasional.</p> <p>Risiko Operasional Risiko ini tergolong operasional karena secara langsung disebabkan oleh kegagalan dalam proses inti atau kegiatan operasional sehari-hari dari Unit Pelaksana Teknis (UPT).</p> <p>Kegagalan ini terjadi ketika kapasitas produksi internal UPT (penyedia) tidak mampu mengimbangi jumlah permintaan yang masuk dari peternak (pelanggan). Ini adalah masalah</p>	<p>Uraian dampak dari tidak tercapainya target persentase pemenuhan permintaan bibit/benih ternak di UPT adalah kebutuhan peternak sebagai pengguna utama tidak dapat dipenuhi secara optimal.</p> <p>## Rincian Dampak Kegagalan ini secara langsung berdampak pada tingkat peternak dan merusak peran UPT sebagai penyedia bibit/benih unggul:</p> <p>Menghambat Perkembangan Usaha Peternakan: Peternak yang bergantung pada UPT untuk mendapatkan bibit/benih unggul akan kesulitan untuk mengembangkan atau meningkatkan skala usahanya. Ini secara langsung menghambat pertumbuhan sektor peternakan di tingkat akar rumput.</p> <p>Menurunnya</p>	Meningkatkan produksi bibit atau benih ternak di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak	UPT Perbibitan dan Produksi Ternak

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Pernyataan Resiko	Penyebab Resiko	Sumber Resiko	Kategori Resiko	Uraian Dampak	Perlakuan Resiko	Penanggung Jawab
					dari UPT tidak dapat dipenuhi, sehingga dapat menghambat perkembangan usaha peternakan di tingkat peternak. • Menurunnya Kepercayaan: Dapat menurunkan kepercayaan peternak terhadap UPT sebagai sumber penyedia bibit/benih yang andal dan bermutu.	mempengaruhi output produksi. Keterbatasan pada salah satu faktor ini menjadi sumber risiko kegagalan pemenuhan permintaan.  Sistem Pencatatan dan Pelaporan: Seluruh data, baik jumlah permintaan maupun jumlah yang dapat dipenuhi, berasal dan diolah oleh UPT itu sendiri. Oleh karena itu, akurasi dan ketepatan waktu dalam sistem pencatatan permintaan dan pelaporan ketersediaan bibit menjadi faktor internal yang dapat mempengaruhi capaian indikator.	klasik dalam manajemen operasi, yang berakar pada proses, sumber daya, dan sistem internal. Hal ini diperkuat oleh solusi (intervensi) yang diusulkan, yaitu "Meningkatkan produksi bibit atau benih ternak di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak," yang merupakan tindakan perbaikan operasional.	Kepercayaan Peternak: Kegagalan UPT untuk memenuhi permintaan secara konsisten dapat menurunkan kepercayaan peternak terhadap UPT sebagai sumber bibit/benih yang andal dan bermutu. Peternak mungkin akan beralih ke sumber lain yang kualitasnya belum tentu terjamin.  Potensi Pemanfaatan Bibit di Bawah Standar: Ketika pasokan bibit/benih unggul dari sumber terpercaya seperti UPT tidak mencukupi, ada risiko peternak akan menggunakan bibit/benih dengan mutu lebih rendah, yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas nasional.		
5	Terjaminnya mutu bibit/benih ternak unggul yang beredar di wilayah kerja di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak	<b>SK5</b>	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih ternak yang beredar dari UPT Perbibitan dan	Tidak tercapainya target persentase bibit/benih bermutu (bersertifikat/terseleksi) yang diedarkan oleh UPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses Mutu Tidak Optimal: Proses seleksi atau sertifikasi untuk memastikan bibit ternak memenuhi kriteria SNI tidak berjalan sebagaimana mestinya di UPT</li> <li>Distribusi Ternak Non-Bibit: UPT</li> </ul>	Rincian Sumber Risiko Proses Seleksi dan Sertifikasi Internal UPT Sumber risiko utama terletak pada efektivitas proses di dalam UPT untuk menyeleksi ternak agar memenuhi kriteria SNI dan mengelolanya hingga mendapatkan sertifikat. Kegagalan dalam proses seleksi atau administrasi sertifikasi akan mengurangi jumlah bibit bermutu yang tersedia.	Kategori risiko untuk tidak tercapainya target persentase bibit/benih bermutu yang diedarkan oleh UPT adalah Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan.  ## Risiko Operasional Risiko ini tergolong operasional karena	Uraian dampak dari tidak tercapainya target persentase bibit/benih bermutu yang diedarkan oleh UPT adalah rusaknya jaminan mutu dan reputasi UPT sebagai sumber bibit/benih ternak unggul.  Rincian Dampak Kegagalan ini secara langsung merusak kepercayaan dan efektivitas program	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan pelaksanaan seleksi benih bibit ternak di UPT</li> <li>Memastikan ternak yang diedarkan telah melalui proses sertifikasi dan/atau seleksi sesuai standar mutu (SNI).</li> <li>Melakukan pengawasan benih bibit ternak yang</li> </ol>	UPT Perbibitan dan Produksi Ternak

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Pernyataan Resiko	Penyebab Resiko	Sumber Resiko	Kategori Resiko	Uraian Dampak	Perlakuan Resiko	Penanggung Jawab
			Produksi Ternak		<p>mengedarkan (menjual/menghibahkan) ternak yang tidak masuk dalam kategori bibit bermutu dalam jumlah yang signifikan, sehingga menurunkan persentase bibit bermutu dari total yang beredar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan Bibit Tidak Terjamin: Peternak menerima bibit/benih dari UPT yang tidak terjamin mutunya, yang dapat menurunkan produktivitas usaha ternak.</li> <li>• Menurunnya Reputasi UPT: Menurunkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap UPT sebagai lembaga penghasil bibit/benih ternak unggul dan bermutu</li> </ul>	<p>Kebijakan Distribusi Ternak oleh UPT Risiko juga berasal dari kebijakan internal UPT terkait distribusi ternak. Indikator ini membandingkan jumlah bibit bersertifikat dengan total ternak yang diedarkan (jual/hibah). Jika UPT mengedarkan sejumlah besar ternak yang tidak bersertifikat (non-bibit), maka persentase bibit bermutu secara otomatis akan turun, meskipun proses sertifikasi untuk bibit unggulnya berjalan baik.</p>	<p>kegagalan pencapaian target bersumber dari proses teknis dan operasional internal UPT. Ini mencakup kegagalan dalam proses seleksi untuk memastikan ternak memenuhi kriteria, serta manajemen untuk mengedarkan ternak yang telah lolos seleksi atau sertifikasi. Singkatnya, ini adalah risiko yang timbul dari proses kerja sehari-hari di UPT.</p> <p><b>## Risiko Kepatuhan</b> Risiko ini juga merupakan risiko kepatuhan (compliance) karena mutu bibit secara eksplisit didefinisikan sebagai "ternak bersertifikat dan/atau yang terseleksi memenuhi kriteria memenuhi kriteria Nasional Indonesia). Kegagalan mencapai target berarti UPT tidak dapat mematuhi</p>	<p>perbibitan di tingkat peternak:</p> <p>Menurunkan Produktivitas di Tingkat Peternak: Peternak yang menerima bibit/benih dari UPT tidak mendapatkan jaminan mutu. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas usaha mereka (misalnya, pertumbuhan lebih lambat atau produksi susu lebih rendah), karena bibit yang diterima belum tentu memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).</p> <p>Merusak Reputasi dan Kepercayaan Publik: Peran UPT sebagai pusat perbibitan yang menghasilkan ternak unggul akan tercoreng. Kegagalan memenuhi standar mutu akan menurunkan kepercayaan peternak dan publik terhadap UPT sebagai sumber bibit yang bisa diandalkan.</p> <p>Menghambat Program Perbaikan Mutu Genetik: UPT adalah ujung tombak dalam mendistribusikan hasil-hasil perbaikan mutu genetik kepada masyarakat. Jika ternak yang diedarkan tidak terjamin mutunya, maka program perbaikan mutu</p>	beredar	

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Pernyataan Resiko	Penyebab Resiko	Sumber Resiko	Kategori Resiko	Uraian Dampak	Perlakuan Resiko	Penanggung Jawab
							standar mutu yang telah ditetapkan. Proses ini juga melibatkan pihak eksternal yaitu Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Benih dan Bibit Ternak, yang menunjukkan adanya prosedur formal yang harus dipatuhi.	genetik ternak secara nasional menjadi tidak efektif dan terhambat.		